YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI UNIVERSITAS BATANGHARI FAKULTAS HUKUM



S K R I P S I

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAMBI NOMOR : 346/Pid.B/2022/PN.Jmb DALAM PERKARA PENCURIAN BERSAMA-SAMA**

Diajukan Untuk Mengikuti Ujian Skripsi Pada Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi

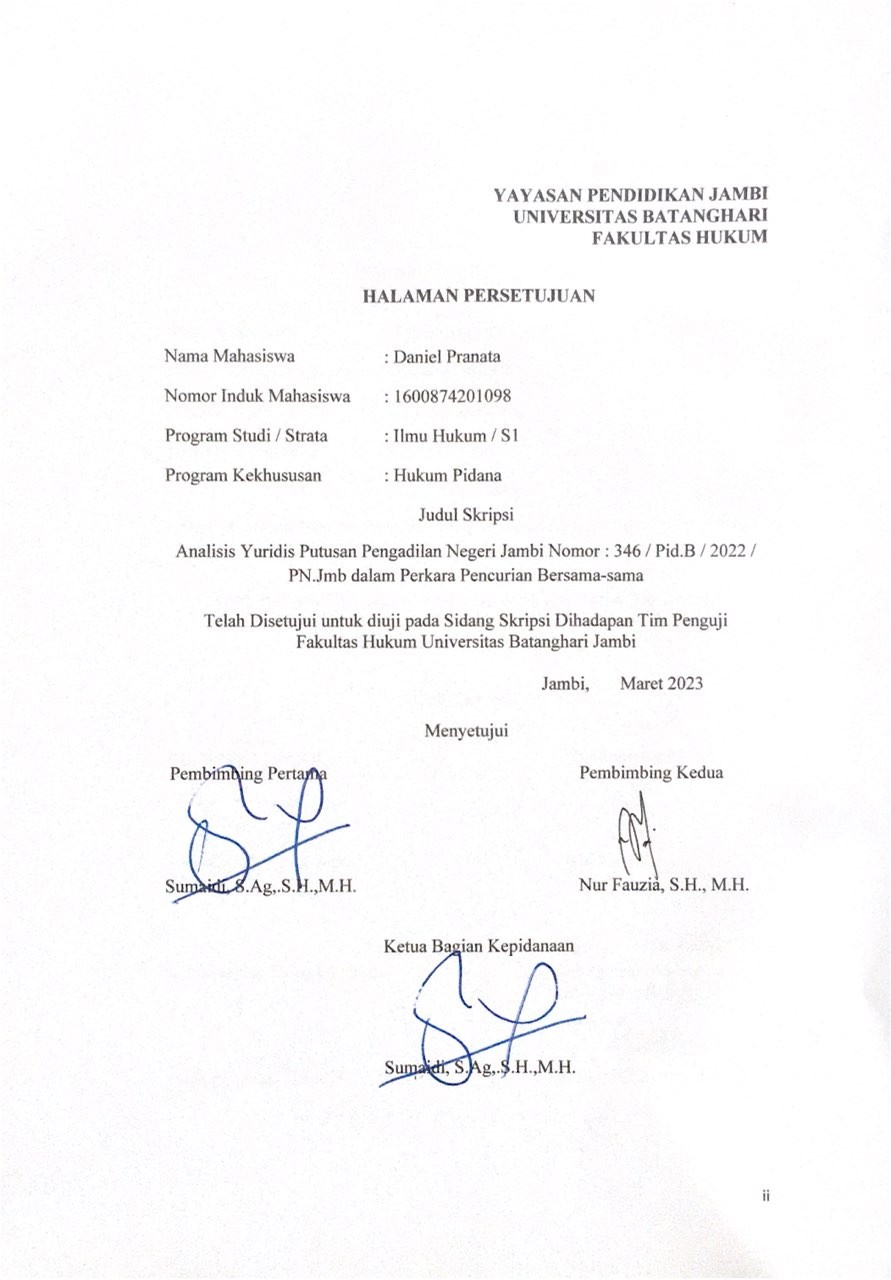
# Oleh :

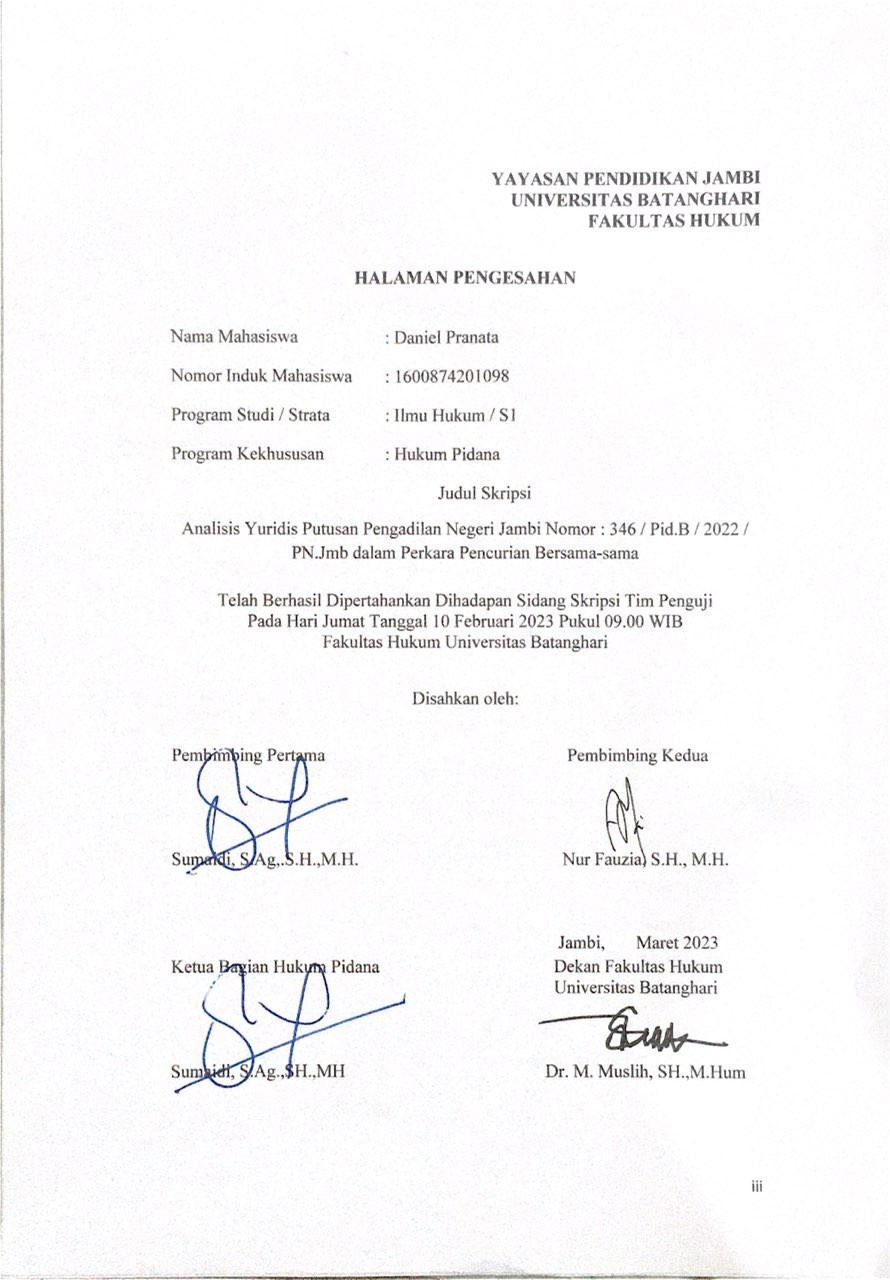
DANIEL PRANATA

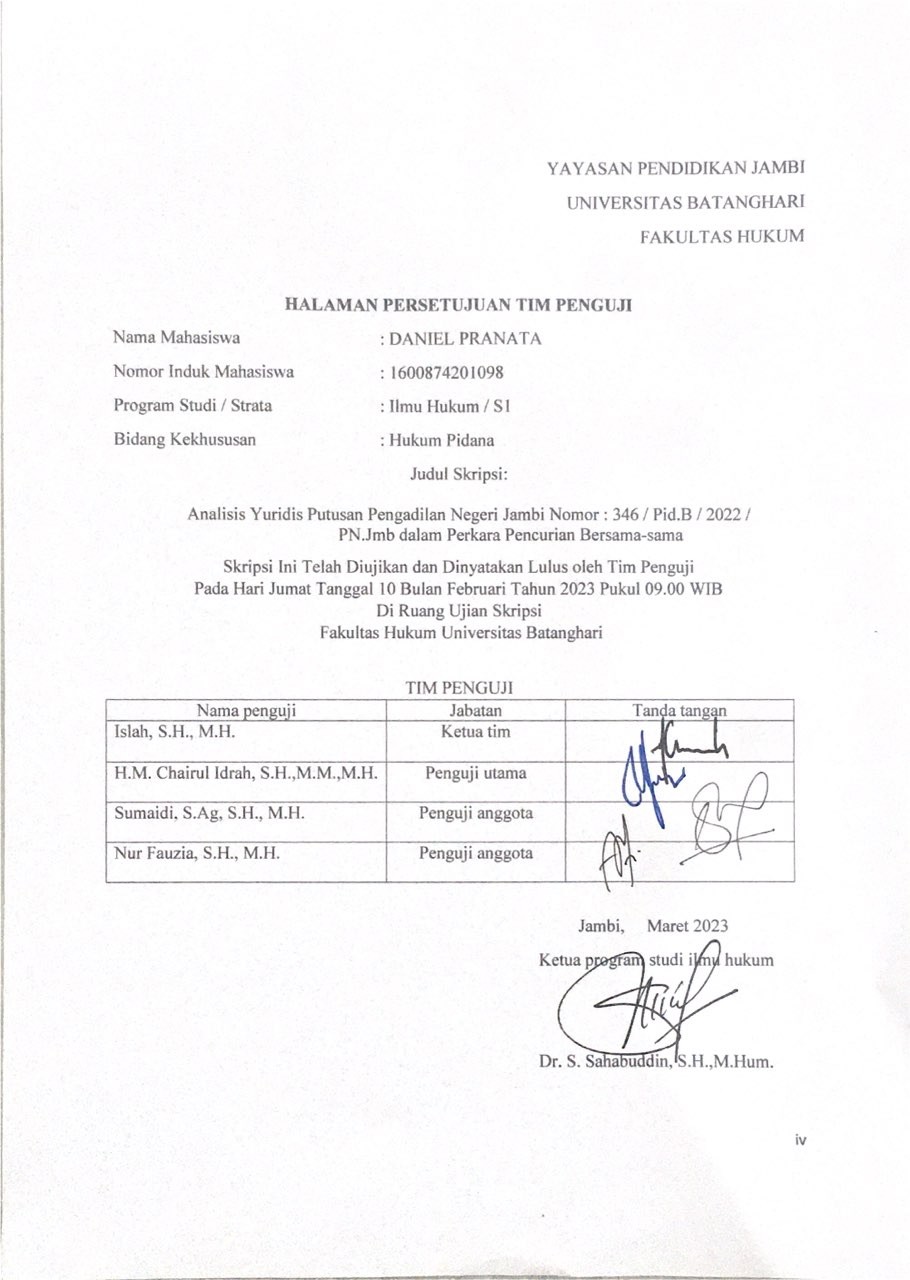
# NIM. 1600874201098

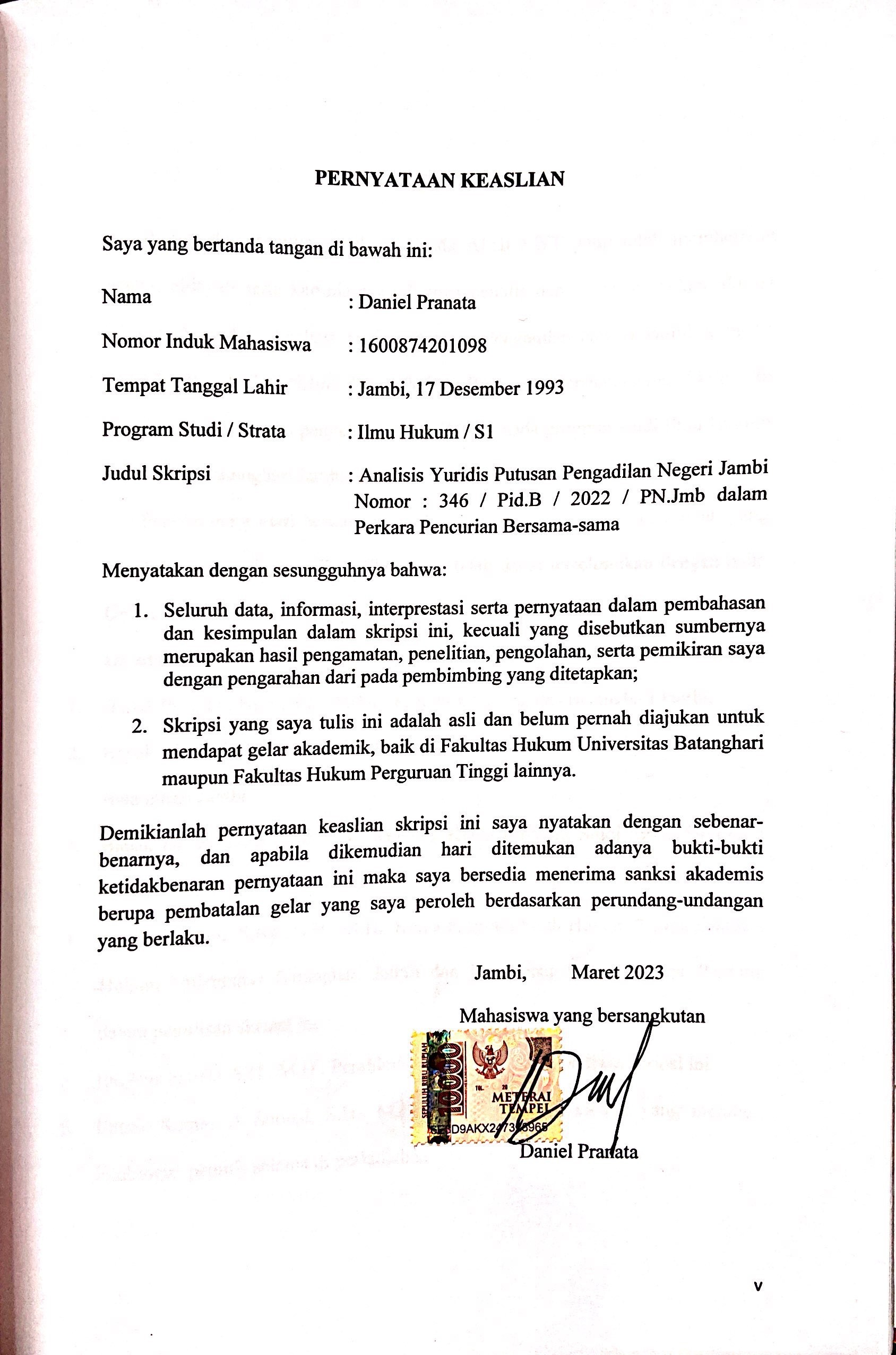
Tahun Akademik

**2022/2023**











# KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat hidayah serta karunia-nya,sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul “Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 346 / Pid.B / 2022 / PN.Jmb dalam Perkara Pencurian Bersama-sama” Skripsi ini diajukan dalam rangka penyelesaian pendidikan pada program studi Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Penulis menyadari berkat adanya bantuan dan bimbingan pihak-pihak yang mendukung penulis, penulisan Skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Herri, S.E., MBA., Pj Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H, M.Hum, Ketua Program Studi Strata Satu (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Bapak Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H., Ketua Program Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi dan juga sebagai Pembimbing Pertama dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Nur Fauzia, S.H., M.H., Pembimbing Kedua dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Kemas A Somad, S.H., M.H., Pembimbing Akademik yang memberi bimbingan penulis selama di perkuliahan.
7. Bapak dan Ibu para Dosen beserta Staf di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
8. Kedua Orang Tua tercinta, Ayahanda Muhaimin dan Ibunda Rodiah yang telah banyak memberikan dukungan penuh, semangat, perhatian, dan selalu mendoakan penulis, yang menjadi motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh Keluarga Besar Kejaksaan Negeri Jambi yang selalu mensupport dan membantu saya dalam penulisan skripsi saya ini.
10. Dan semua pihak yang terlibat dalam membantu penulis selama proses penyelesaian skripsi ini penulis ucapkan terimakasih banyak.

Jambi, Maret 2023 Hormat Penulis

# DANIEL PRANATA

# ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang tindak pidana pencurian yang dilakukan secara bersama-sama di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Jambi. Karena semakin maraknya kasus pencurian dengan pengulangan yang terjadi dapat di kategorikan kejahatan darurat, Pasal 362 KUHP. Permasalahan dalam penelitian ini adalah pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, terkait penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku dan pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah Hakim menjatuhkan hukuman penjara satu tahun sepuluh bulan, yang jauh lebih kecil dari hukuman maksimal tujuh tahun untuk orang dewasa. Mengingat putusan hakim harus didasarkan pada persyaratan Undang-Undang dan harus menilai kembali kerugian yang diderita oleh korban dan terdakwa yang terlibat, maka tumpang tindih ini tentu menimbulkan masalah residivis, yaitu merujuk pada orang yang berulang kali melakukan kejahatan. Tujuan akhir dari pemidanaan pelaku merenungkan dan mengakui kesalahan atas tindakannya serta tidak mengulangi perbuatannya.

Kata kunci : Pencurian secara bersama-sama. Pelaku Residivis, Tujuan Pemidanaan.

# DAFTAR ISI

**HALAMAN JUDUL ................................................................................................**

HALAMAN PERSETUJUAN ii

HALAMAN PERSETUJUAN ii

HALAMAN PENGESAHAN iii

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI iv

PERNYATAAN KEASLIAN v

[KATA PENGANTAR vi](#_TOC_250018)

[ABSTRAK viii](#_TOC_250017)

[DAFTAR ISI ix](#_TOC_250016)

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAMBI NOMOR : 346 / PID.B / 2022 / PN.JMB DALAM PERKARA PENCURIAN BERSAMA-SAMA

[BAB I PENDAHULUAN 1](#_TOC_250015)

* 1. [Latar Belakang 1](#_TOC_250014)
  2. Perumusan Masalah 4
  3. [Tujuan Penelitian dan Penulisan 5](#_TOC_250013)
  4. Kerangka Konsepsional 5
  5. [Landasan Teoritis 8](#_TOC_250012)
  6. Metodologi Penelitian 17
  7. [Sistematika Penulisan 20](#_TOC_250011)

[BAB II TINJAUAN UMUM 22](#_TOC_250010)

Tinjauan tentang Dasar Pertimbangan Hakim 22

* + 1. [Hal-hal yang memberatkan, meringankan dan menghapuskan pidana 29](#_TOC_250009)
    2. [Jenis-jenis Putusan 36](#_TOC_250008)

[BAB III TINJAUAN UMUM 39](#_TOC_250007)

1. [Tinjauan tentang Pelaku Tindak Pidana 39](#_TOC_250006)
2. [Tinjauan tentang Tindak Pidana Pencurian 44](#_TOC_250005)

[BAB IV PEMBAHASAN 49](#_TOC_250004)

1. Penerapan Hukum Pidana Materil terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan

secara Bersama-sama 49

1. Pertimbangan Hukum oleh Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan secara

Bersama-sama 59

[BAB V PENUTUP 74](#_TOC_250003)

* 1. [Kesimpulan 74](#_TOC_250002)
  2. [Saran 75](#_TOC_250001)

[DAFTAR PUSTAKA 76](#_TOC_250000)

# BAB I PENDAHULUAN

# Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amademen ke-4 secara tegas menyebut Negara Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Warga negara seharusnya mendasarkan semua keputusan, sikap, dan perilaku mereka dalam masyarakat di mana supremasi hukum adalah yang terpenting.

Apa yang dibutuhkan individu dan apa yang dilarang ditentukan oleh hukum. Tujuan hukum adalah untuk menegakkan dan melindungi hak-hak komunal dan individu serta kepentingan nasional. Itu tidak pernah bertujuan untuk hanya menghukum pelanggar hukum potensial.

Hukum pidana, yang berfungsi sebagai standar perilaku bagi negara yang berdaulat, melarang tindakan tertentu dan didukung oleh arahan, sanksi pidana bagi mereka yang tidak mematuhinya, kapan dan dalam kondisi apa sanksi pidana itu dikeluarkan, dan bagaimana hukumannya dikelola. Tindakan melakukan kejahatan dilakukan oleh negara. Ali Zaidin mendefinisikan hukum pidana sebagai ketentuan Undang-Undang/Undang-Undang yang menentukan perbuatan apa saja yang dilarang/tidak dilakukannya dan ancaman hukuman bagi yang melakukannya. Menurut Teguh Prasetyo, hukum pidana adalah kumpulan

Undang-Undang yang dibuat oleh negara, yang ketentuannya berupa syarat-syarat atau larangan-larangan yang diancam dengan pengenaan hukuman.1

Pencurian adalah masalah yang terus-menerus dan diatur sebagai salah satu jenis kejahatan terhadap harta benda manusia dalam Bab XXII Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Baik di masyarakat perkotaan maupun pedesaan maupun internasional, pencurian marak terjadi.

Pencurian didefinisikan oleh KUHP sebagai mengambil milik orang lain sementara melanggar hak-hak mereka. Lihat Pasal 362 sampai dengan 367 KUHP untuk lebih jelasnya.

Penulis halaman ini bermaksud untuk berbicara tentang Pasal 362 dan 363 KUHP. Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun barangsiapa membeli barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk menguasai barang tersebut secara melawan hukum, sebagaimana dilarang dalam Pasal 362 KUHP pidana penjara maksimal bagi pencurian barang lima tahun atau denda sebesar Rp. 900.000.

Berikut adalah unsur-unsur pokok pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP:

* 1. Unsur subyektif, atau keinginan untuk menguasai barang secara melawan hukum.
  2. Unsur objektif, atau orang yang mengambil sesuatu yang sebagian atau seluruhnya menjadi milik orang lain.

1 H. Ishaq, *Hukum Pidana,* Depok: Rajawali Pers, 2020, hal. 23.

Untuk membuktikan bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana pencurian, harus dibuktikan bahwa ia telah memenuhi setiap kriteria tindak pidana yang disebutkan dalam Pasal 362 KUHP. Pencurian yang terjadi pada malam hari di dalam rumah atau pekarangan yang terkunci dan tidak ada orang di dalamnya diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun berdasarkan Pasal 363 KUHP:

1. Tempat tinggal orang asing atau orang yang tidak dikehendakinya
2. Pencurian yang dilakukan pada saat terjadi kebakaran, letusan gunung berapi, banjir, gempa bumi atau gempa laut, kapal karam, kecelakaan kereta api, kerusuhan, pemberontakan, atau ancaman perang; pencurian oleh orang yang salah;
3. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
4. Pencurian yang dilakukan oleh orang yang zalim dengan memasukkan harta; pencurian yang dilakukan oleh pencuri ternak; dan
5. Pencurian yang dilakukan oleh orang yang zalim dengan masuk tanpa izin.

Bagian 2 Pasal 363 Jika salah satu barang yang disebut dalam angka 4 atau 5 ada bersama dengan pencurian yang disebut dalam angka 3, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Kasus-kasus yang masuk dalam lingkup Pengadilan Negeri Jambi menjadi perhatian penulis yaitu kasus nomor 346/Pid.B/2022/PN.Jmb. Jika dua orang bertanggung jawab atas kejahatan tersebut, mereka mencuri harta milik orang lain seluruhnya atau sebagian dengan tujuan menahannya secara ilegal pada malam hari di rumah terkunci atau halaman properti. Dengan merusak, memotong, atau

memanjat, atau dengan menggunakan perlengkapan kantor palsu, pesanan palsu, atau kunci palsu, perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang tidak diketahui atau tidak diinginkan oleh orang yang berhak.

Apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku pada saat tertentu di bulan Februari 2022, maka dianggap sebagai pencurian serentak.

Permohonan Jaksa Penuntut Umum tersebut menurut penulis lebih tinggi dari putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi. Kerugian Dua puluh juta rupiah yang hilang oleh korban dalam putusan nomor 615/Pid.B/2015/PN.Jmb, yang penulis nilai cukup besar. Penulis sangat termotivasi untuk membuat skripsi dengan judul **“Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 346/Pid.B/2022/PN.Jmb dalam Perkara Pencurian Bersama-sama”.**

# Rumusan Masalah

Untuk menghindari kebingungan dalam penulisan skripsi ini dan mengingat latar belakang tersebut di atas, maka penulis membatasi masalah pada rumusan, khususnya:

1. Bagaimanakah Penerapan Hukum Pidana Materil terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama- sama?
2. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama?

# Tujuan Penelitian dan Penulisan

* 1. Tujuan Penelitian
     1. Untuk mengetahui bagaimanakah Penerapan Hukum Pidana Materil terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama.
     2. Untuk mengetahui bagaimanakah Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama.
  2. Tujuan Penulisan
     1. Penulisan ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat penulisan skripsi untuk program studi hukum di Universitas Batanghari Jambi.
     2. Untuk berkontribusi pada tubuh pengetahuan tentang hukum pidana dan menawarkan saran kepada pihak yang membutuhkan informasi.

# Kerangka Konseptual

Perhatikan hal-hal berikut untuk memahami makna dari judul skripsi ini: gagasan-gagasan berikut:

* 1. Analisis Yuridis

Definisi dan makna kata Analisis yuridis adalah serangkaian tindakan yang digunakan untuk mengamati, mendeskripsikan, dan/atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan standar hukum untuk menentukan apakah objek tersebut melanggar hukum. Ungkapan ini sering digunakan

untuk menggambarkan teknik penelitian dalam tulisan-tulisan hukum ilmiah. Namun, masyarakat umum juga menggunakan analisis hukum yang lugas untuk menilai suatu perbuatan hukum atau konsekuensi hukumnya.

* 1. Penjatuhan Pidana

Sanksi pidana atau hukuman terkadang dipandang sebagai ultimum remedium, atau garis pertahanan terakhir, terhadap aktivitas kriminal. Perspektif seperti itu tidak selalu berguna untuk membangun tatanan sosial atau sebagai instrumen ampuh untuk menghalangi dan menghapuskan kejahatan. Selain itu, tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah tindakan ilegal, namun masih ada masalah dengan aspek kriminal dan niat kriminal. hukuman.2 Ada dua kemungkinan interpretasi pengenaan pidana.:

* + 1. Secara umum, orang yang mempengaruhi peraturan perundang- undangan adalah mereka yang memutuskan sistem pemidanaan dalam hukum pidana (penalty in abstracto).
    2. Secara khusus, yang berkaitan dengan berbagai organisasi atau departemen yang membantu dan menjalankan sistem peradilan pidana..3
  1. Pelaku Tindak Pidana

Pasal 55 KUHP menjelaskan tentang orang yang melakukan kejahatan:

1. Dihukum seolah-olah melakukan kejahatan:
   1. Mereka yang dengan sengaja menyebabkan orang lain melakukan sesuatu dengan menawarkan mereka insentif,

2 Roni Wiyanto*, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hal 110

3 *Ibid*

* 1. Mengadakan perjanjian, menggunakan pengaruh atau kekuasaan yang tidak semestinya, menggunakan kekerasan, ancaman, atau penipuan, atau dengan menawarkan kesempatan, sumber daya, atau informasi kepada mereka.

1. Kegiatan yang dengan sengaja didorong oleh mereka dan hasil dari tindakan tersebut adalah satu-satunya hal yang dapat dimintai pertanggungjawaban kepada orang yang disebutkan dalam sub-ayat (b) tentang dia.
2. Tindak Pidana Pencurian

Definisi pencurian dalam KUHP tercantum dalam Pasal 362, yang menyatakan bahwa “Barangsiapa mengambil sesuatu, yang diancam dengan pencurian, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak enam puluh rupiah, jika diketahui dengan sengaja. memegangnya secara ilegal." sesuatu yang seluruhnya atau sebagian dimiliki oleh orang lain. Diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun sesuai dengan Pasal 363 KUHP sebagai berikut:

* 1. Pencurian ternak (K.U.H.P. 101);
  2. Pencurian pada saat terjadi bencana seperti kebakaran, ledakan, banjir, gempa bumi, gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal kandas, kecelakaan kereta api;
  3. Pencurian yang dilakukan pada malam hari di tempat tinggal tertutup atau oleh beberapa orang;
  4. Pencurian yang dilakukan dengan kekerasan; dan
  5. Pencurian yang dilakukan dengan kekerasan di tempat umum Dengan mendatangi tempat kejadian perkara, dapat mencuri benda, membongkar, memecahkan, atau memanjat, atau dengan menggunakan kunci palsu, KTP palsu, atau seragam palsu, pelaku dapat melakukan kejahatan.

# Landasan Teoritis

* 1. Teori Pertimbangan Hakim

Komponen terpenting dalam menentukan apakah suatu putusan hakim akan benar-benar bernilai bagi pihak-pihak yang berkepentingan adalah pertimbangan hakim, sehingga harus ditangani dengan baik, cermat, dan bijaksana.

Soedarto mengklaim bahwa hakim membuat keputusan tentang masalah berikut:4

* + 1. Penentuan apakah orang yang dituduh benar-benar melakukan kejahatan yang dituduhkan kepadanya.
    2. Penetapan hukum kesalahan terdakwa dan potensi hukuman, serta apakah tindakan terdakwa merupakan kejahatan.
    3. Pilihan hukuman yang tepat, jika tersedia untuk terdakwa.

Putusan hakim yang baik dan sempurna harus dapat lolos uji empat arah dengan menjawab empat pertanyaan kriteria krusial berikut ini, sesuai dengan prinsip dasar pertimbangan hakim:

1. Apakah pilihan saya tepat?
2. Apakah saya membuat keputusan dengan jujur?

4 Lilik Mulyadi, *Hal-hal yang mendasar dalam penjatuhan pemidanaan oleh hakim,* Sinar Grafika Cipta, Jakarta, 2010, halaman 127

1. Apakah keputusan tersebut memperlakukan para pihak secara adil?
2. Apakah pilihan saya menguntungkan?5

Untuk menentukan bagaimana menghukum pelanggar, pertimbangkan tingkat kesalahan mereka. Dasar untuk ini adalah prinsip kesalahan. Menurut Barda Nawawi Arief, pedoman pemidanaan dalam putusan melanggar dua prinsip utama, yaitu asas legalitas dan asas bersalah.

Hakim harus mengambil langkah untuk menegakkan keadilan dengan terlebih dahulu menentukan apakah keadaan yang diajukan kepadanya benar. Terakhir, menarik kesimpulan dengan menetapkan hukuman atas kejadian tersebut berupa keputusan akhir setelah mempertimbangkan kejadian tersebut, menilainya, dan mengaitkannya dengan standar hukum yang relevan.

UU No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim dan hakim konstitusi harus mencermati, menegakkan, dan memahami rasa keadilan dalam masyarakat dan cita-cita hukum, sesuai Pasal 5 ayat 1.

1. Pengertian Putusan

Pernyataan hakim di pengadilan untuk menyimpulkan suatu perkara di hadapannya disebut sebagai putusan..6 Orang yang membuat keputusan adalah pembeda utama dalam pemahaman tradisi common law tentang suatu keputusan. Dalam sistem common law, juri memiliki kekuasaan untuk memberikan putusan atau memutuskan suatu perkara yang sedang diadili

karena menurut kebiasaan hukum Indonesia, majelis hakim

5 Ibid, halaman 128

6 Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2002, halaman 201

mempertimbangkan hasil sebelum mengeluarkan putusan. Putusan juri tidak serta merta harus bulat karena keputusan mayoritas akan diikuti jika terjadi perbedaan pendapat. Akibatnya, dalam tradisi common law, ada beberapa putusan pengadilan yang putusan juri tidak ditegakkan seluruhnya melainkan dengan suara terbanyak. Hal ini dapat dipahami mengingat setiap juri memiliki latar belakang yang unik, termasuk dalam hal pengetahuan, interaksi sosial, warisan budaya, pengalaman psikologis, dan keyakinan agama. Oleh karena itu, tidak jarang juri yang berbeda dapat memiliki pendapat yang berbeda dalam situasi seperti itu. Beberapa keputusan yang mengikuti common law dibuat berdasarkan suara terbanyak karena salah satu hakim di panel menyuarakan perbedaan pendapat. Tidak semua keputusan yang mengikuti hukum umum dibuat dengan suara bulat atau bulat.

Setiap hakim mendasarkan penilaiannya pada faktor hukum. Hakim mendasarkan keputusan mereka pada masalah hukum dalam setiap kasus yang mereka dengar. Pertimbangan hukum tidak hanya mencakup argumentasi atau pertimbangan yang logis, tetapi juga unsur-unsur lain, seperti penafsiran hakim dan konstruksi hukum terhadap perkara yang diadili. Diperlukan pengaturan faktor-faktor yang sistematis dan menyeluruh. Berikut adalah uraian tentang pertimbangan hukum:

* 1. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan pengadilan dalam memutus perkara, yaitu:
     1. kompetensi absolut
     2. kompetensi relatif
  2. Faktor-faktor berikut mempengaruhi kedudukan hukum penggugat:
     1. Kedudukan dan kapasitas hukum penggugat
     2. Legalitas surat kuasa
     3. Formalitas yang terkait dengan surat kuasa
  3. Dalam menanggapi pertimbangan hukum tersebut, majelis hakim tidak hanya menyelesaikan pokok-pokok sengketa dengan memperhatikan pokok-pokok gugatan penggugat dan kesulitan- kesulitan utama. Majelis hakim akan memutuskan dalil mana yang diterima dan ditolak oleh tergugat.
  4. Faktor-faktor yang berkaitan dengan persoalan yang perlu dibuktikan melalui para pihak.

Pertimbangan pokok sengketa merupakan perluasan dari pertimbangan sebelumnya. Majelis hakim akan menentukan apakah tuntutan yang diajukan oleh Penggugat masih perlu didukung oleh bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam sidang pembuktian setelah mengklasifikasikan tuntutan tersebut diakui atau disangkal oleh Tergugat.

* 1. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan sehubungan dengan pembuktian para pihak

1. Mempertimbangkan standar formal untuk pembuktian.
2. Evaluasi substansi atau isi bukti dan penerapannya pada masalah.
3. Faktor-faktor yang berkaitan dengan kualitas bukti.
4. Menentukan apakah satu bagian dari bukti yang tepat dalam hubungannya dengan bagian lain dari bukti.
   1. Memperhatikan informasi yang disampaikan di persidangan

Saat fakta persidangan dihitung, hakim akan memilih bukti mana yang lebih kuat yang akan meyakinkan hakim untuk menarik kesimpulan berdasarkan fakta persidangan.

Menurut KUHAP, seorang hakim dapat memutuskan beberapa hal, antara lain sebagai berikut:

a. Pengertian Putusan

Pengadilan akan memberikan putusan bebas (Vrijspraak), yang membebaskan terdakwa dari tuduhan yang didakwakan kepadanya, jika surat dakwaan tidak cukup bukti yang diberikan oleh jaksa penuntut umum terhadap terdakwa di persidangan untuk membuktikan bahwa terdakwa melakukan kejahatan tersebut. Jika terdakwa dinyatakan tidak bersalah atas tindak pidana yang dimuat dalam dakwaan penuntut umum, maka terdakwa dinyatakan bebas dari segala dakwaan, menurut Pasal 191 KUHAP pasal 191 ayat (1).

1. Penghentian semua tindakan (Onslag van Alle Recht Vervolging)

Apabila dalam persidangan ternyata dalam persidangan bahwa terdakwa secara meyakinkan dan sah menurut Pasal 191 ayat (2) KUHAP, apabila terdakwa dinyatakan bersalah sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan penuntut umum tetapi ternyata perbuatan yang dituduhkan itu

tidak melawan hukum, hakim dapat memutuskan untuk membebaskan terdakwa dari segala dakwaan.

1. Putusan Pemidanaan

Jika terdakwa melanggar Undang-Undang dan secara hukum terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan penuntut umum, maka pelaku dipidana sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya (Pasal 193 ayat (1) KUHAP).7

Hal-hal yang mengubah berat ringannya pidana menurut KUHP: Pasal 44

* 1. Tidak seorang pun dapat dihukum untuk suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena kemampuan intelektualnya (zijner verstandelijke vermogens) rusak karena penyakit atau kekurangan dalam pertumbuhan.
  2. Jika ternyata pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena perbuatannya terganggu atau perkembangan jiwanya terganggu karena penyakit, hakim dapat memerintahkan agar orang tersebut ditempatkan di rumah sakit jiwa dengan masa percobaan paling lama satu tahun.
  3. Satu-satunya pengadilan yang menerapkan aturan ayat 2 adalah Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.

*7* Ahmad Rifai*,Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif,* Cet.1, Sinar Grafika, Jakarta,2010, hal.115-117.

Pasal 48

“Barangsiapa melakukan perbuatan di bawah pengaruh,tidak dipidana jika menggunakan kekuatan (paksaan) yang berlebihan”.

Bab 49

1. Sementara melindungi diri sendiri, orang lain, milik sendiri, atau milik orang lain dari serangan yang mengancam baik langsung atau segera adalah melawan hukum, pembelaan diri tidak ilegal.
2. Tekanan psikologis yang signifikan yang ditimbulkan oleh penyerangan atau ketakutan akan penyerangan tidak boleh mengakibatkan hukuman karena pembelaan paksa yang berlebihan.

Bab 50

"Barangsiapa melanggar hukum untuk melaksanakan persyaratannya tidak akan dihukum."

Bab 51

1. Tidak seorang pun akan dihukum karena bertindak sesuai dengan perintah posisi yang dikeluarkan oleh otoritas yang tepat.
2. Suatu perintah Suatu jabatan tanpa wewenang tidak mengakibatkan pengabaian hukuman kecuali orang yang dipimpin dengan jujur percaya bahwa perintah itu diberikan dengan wewenang dan bahwa pelaksanaannya berada dalam ruang lingkup pekerjaannya.

Pasal 52

Jika seorang pejabat mengabaikan tanggung jawab khusus yang diberikan kepadanya oleh jabatannya atau menggunakan wewenang, sumber daya, atau

kesempatan yang diberikan kepadanya karena jabatannya untuk melakukan kejahatan, pidananya dapat dinaikkan sepertiga.

Pasal 52a

“Bila bendera Republik Indonesia dikibarkan pada waktu kejahatan dilakukan, pidananya ditambah sepertiga”.

Selain itu, Samenloop (Belanda) atau Concursus. Yang dimaksud dengan persetujuan adalah melakukan dua atau lebih kejahatan oleh orang yang sama tanpa dipidananya kejahatan pertama atau penetapan hakim yang menetapkan batas waktu antara kejahatan pertama dan kedua.8

Menurut Utrecht, ada tiga akibat yang mungkin terjadi ketika satu orang melakukan banyak kejahatan:

* 1. Kejadian serentak adalah suatu keadaan dimana dua tindak pidana dilakukan pada waktu yang bersamaan, tetapi hanya salah satunya saja yang teridentifikasi sebagai tindak pidana sejak terjadinya terlebih dahulu. Pada dasarnya tidak ada kejengkelan kriminal di sini; sebaliknya, hukumannya diringankan. Hal ini karena beberapa kejahatan akan dicatat, diselidiki, dan diadili dalam satu kasus, dan pelaku hanya akan menerima satu hukuman. Misalnya, berdasarkan Pasal 338, hukuman maksimal untuk dua pembunuhan tidak lebih dari 20 tahun penjara, sementara satu hukuman penjara maksimal 15 tahun (15 tahun ditambah sepertiga, Pasal 65).

8 Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana,* Jakarta, P.T. sofmedia, 2012, Hal. 333

* 1. Ada pengulangan dalam hal ini jika suatu tindak pidana sebelumnya diputus oleh hakim yang menjatuhkan pidana kepada pelakunya dengan putusan yang telah ditetapkan. Pengulangan terjadi dalam hukuman pencipta untuk pelanggaran kedua ini, dan hukuman pidana sepertiga diterapkan di sini.
  2. Tidak ada konkuren atau pengulangan di sini; melainkan setiap tindak pidana dipidana secara tersendiri sesuai dengan pidana maksimumnya dalam hal penjahat yang melakukan tindak pidana itu baru pertama kali dipidana, tetapi putusannya belum memberikan akibat hukum yang nyata. Masing-masing menghadapi banyak ancaman pelanggaran ini.9

*Residivisme,* juga dikenal sebagai pengulangan tindak pidana, terjadi ketika seseorang melakukan kejahatan lain setelah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan atau pelanggaran, diberi hukuman, dan hukuman itu dilakukan.

Orang yang telah melakukan kejahatan lebih dari satu kali biasanya disebut sebagai "residivis", dan anggota parlemen percaya bahwa sangat penting untuk menghukum mereka lebih keras daripada penjahat yang hanya melakukan kejahatan satu kali.10

9 Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana,* Jakarta, P.T. sofmedia, 2012, Hal. 333

10 *Ibid*, hal: 331

# Metode Penelitian

* 1. Tipe Penelitian

Peter Mahmud Marzuki menegaskan bahwa jika dilihat dari substansinya, kajian hukum dapat dibedakan menjadi penelitian hukum normatif dan doktrinal, artinya:

1. Penelitian tentang masalah hukum normatif, seperti peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, kontrak, dan cita-cita hukum masyarakat (atau disebut juga penelitian empiris).
2. Penelitian hukum doktrinal, seperti studi aturan hukum, karya hukum yang menguraikan pendapat para pengacara terkemuka, dan studi hukum komparatif.11

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Menemukan peraturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan teori-teori hukum merupakan tujuan dari kajian hukum normatif.12 Penelitian hukum normatif dapat dilakukan, terutama pada sumber-sumber yang memuat konsep-konsep hukum.

* 1. Pendekatan penelitian

Lima (lima) cara yang dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki untuk melakukan penelitian hukum meliputi metode perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan

11 Sahuri Lasmadi, *Pertanggungjawaban Koporasi Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Indonesia, Disertasi Doktor Pasca Sarjana Universitas Airlangga,* Surabaya, *2003,* hal*.*63

12 Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum,* Bandumg, Mandar Maju, 2008, hal. 90

perbandingan (*comparative approach*), pendekatan kasus (*case law approach*) dan pendekatan sejarah (*history approach*)13

Berikut metodologi pendekatan penelitian:

* + 1. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan yang dilakukan adalah memeriksa semua hukum dan peraturan yang berkaitan dengan topik penelitian dan masalah yang disajikan.

* + 1. Pendekatan kasus (*case law approach),*

Teknik hukum kasus, yaitu melakukan penelitian terhadap konsep-konsep yang langsung relevan dengan pokok bahasan kajian, dalam hal ini Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 346/Pid.B/2022/PN.Jmb dalam perkara pencurian bersama-sama.

* + 1. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*),

Mempelajari teori-teori hukum, asas-asas hukum, dan konsep-konsep hukum yang relevan penting untuk mempraktekkan teknik ini.

* 1. Sumber Data

Sumber informasi yang digunakan dalam penelitian tercantum di bawah ini:

* + 1. Data Primer dikumpulkan dengan berbicara langsung dengan Jaksa Penuntut Umum.
    2. Data sekunder. Informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk internet, jurnal hukum, dokumen pemerintah, peraturan perundang-undangan, dan publikasi hukum.

13 Peter mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet 2, kencana, Jakarta, 2005, hal 92

* 1. Teknik Pengumpulan Data

Wawancara digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data dan informasi dari lapangan. Oleh karena itu, penulis menggunakan metode wawancara secara langsung untuk mengumpulkan data dengan terlebih dahulu membuat daftar pertanyaan dan meninjau berkas kasus.

* + 1. Wawancara

Dalam sebuah wawancara, penulis mengajukan pertanyaan untuk memperoleh tanggapan yang berkaitan dengan topik yang sedang dibahas Di Kejaksaan Negeri Jambi, maka Jaksa Penuntut Umum diperiksa.

* + 1. Dokumen

Penelitian hukum meliputi penelitian bahan-bahan berupa data yang diperoleh dengan menelaah secara seksama dokumen-dokumen yang ada, berupa peraturan perundang-undangan tertulis, publikasi, dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian ini, yaitu tindak pidana pencurian.

* 1. Teknik Penentuan Sampel

Untuk menghasilkan unit sampling dengan sifat-sifat yang sesuai, sehingga strategi sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah strategi **purposive sampling**. Kejaksaan Negeri Jambi memiliki 2 (dua) orang Jaksa Penuntut Umum yang memenuhi persyaratan dimaksud.

* 1. Analisis Data

Analisis dilakukan dengan cara:

* + 1. Menafsirkan semua ketetapan dan aturan berdasarkan masalah yang diangkat.
    2. Tinjauan sumber daya yang tersedia untuk mata pelajaran yang dicakup.
    3. Mengevaluasi hukum dan peraturan yang berkaitan dengan masalah yang dicakup.

# SISTEMATIKA PENULISAN

Isi lengkap dan penjelasan sistematika penulisan skripsi ini telah kami uraikan untuk memudahkan pembaca memahaminya dengan lebih baik. Struktur sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Konteks permasalahan yang menjadi inspirasi penulis dalam pembuatan skripsi ini dibahas pada Bab I Pendahuluan. Rumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teori, strategi penulisan, dan deskripsi sistem penulisan semuanya termasuk dalam bab ini.

Bab II Tinjauan Umum. Penulis mengkaji analisis yuridis, penjatuhan pidana, pelaku tindak pidana, tindak pidana pencurian dalam bab ini.

Bab III Pembahasan: Pada bab ini, penulis akan membahas kriteria hukum yang menjadi pertimbangan penuntut umum dalam menentukan apakah akan menghukum mereka yang melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh banyak orang sekaligus, serta bagaimana penerapan hukum pidana materil kepada pelanggar seperti orang yang melakukan tindak pidana bersama, mereka melakukan tindak pidana pencurian.

Bagian IV Bab ini diakhiri dengan memberikan tinjauan atas semua uraian sebelumnya, menarik sejumlah kesimpulan, dan menawarkan sejumlah saran yang terbukti bermanfaat.

# BAB II TINJAUAN UMUM

**A. Tinjauan Tentang Dasar Pertimbangan Hakim**

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
2. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.14

Hakim juga memperhatikan alasan yang meringankan dan

memberatkan terdakwa dalam persidangan antara lain:

14 Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni. Bandung, 1986. Hal 74

1. Ada keringanan hukum dengan memberikan jawaban yang jujur dan sopan dari apa yang ditanyakan hakim.
2. Selama persidangan berjalan terdakwa bersikap soan dan mengakui perbuatannya.
3. Akan memberatkan hukuman bagi terdakwa bilamana menjawab pertanyaan hakim secara berbelit-belit dan ada unsur berdusta atau mempersulit jalannya persidangan.
4. Akan memberatkan hukuman bagi terdakwa yang residiv.
5. Di dalam hukum pidana Indonesia,kita menganut sistem pembuktia yang memerlukan dua syarat,yaitu:
   1. Alat bukti yang sah yang ditetepkan oleh Undang-Undang.
   2. Oleh karena dengan alat-alat bukti yang sah yang ditetapkan oleh Undang-Undang saja,belum cukup memaksa hakim pidana menganggap bukti sudah diberikan,akan tetapi masih dibutuhkan adanya keyakinan hakim.15

Pasal 24 UUD ayat 3 dan 4 berbunyi :

1. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
2. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,

15 Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Perkembangannya, Jakarta, 2012. Hal 324*

lingkungan peradilan tata usaha negara, dan sebuah Mahkamah konstitusi.

1. Badan-badan lain yang fungsi nya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dengan Undang-Undang.

Peraturan perundang-undangan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan : “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan dan menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Pasal 1 butir 11 KUHAP menyebutkan bahwa, “putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”.

Teori dasar pertimbangan hakim, yaitu putusan hakim yang baik, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan 4 kriteria dasar pertanyaan (*the four way test*) berupa:

1. Benarkah putusanku ini?
2. Jujurkah aku dalam mengambil keputusan?
3. Adilkah bagi pihak-pihak putusan?
4. Bermanfaatkah putusanku ini?16

16 Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya, 2007, Hal. 136

Kebebasan hakim menjatuhkan putusan dalam proses peradilan pidana terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan :

Ayat (1) : Dalam menjatuhkan tugas dan fungsinya, hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.

Ayat (2) : Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam UUD Kesatuan RI Tahun 1945.

Isi pasal tersebut dipertegas lagi dalam Pasal 5 ayat (1) UU No 48 Tahun 2009 tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan : “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Segala keputusan pengadilan selain harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk menggali, kaedah hukum yang hidup dan berkembang didalam masyarakat. Putusan pengadilan merupakan tanggung jawab hakim dalam melaksanakan tugasnya, untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya dimana pertanggungjawaban tersebut tidak hanya dijatuhkan kepada hukum, dirinya sendiri ataupun masyarakat luas, tetapi yang lebih penting lagi itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Proses atau tahapan penjatuhan putusan oleh hakim, dalam perkara pidana, menurut Moeljatno, dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu:

1. Tahap Menganalisis Perbuatan Pidana Pada saat hakim menganalisis, apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan tersebut sebagai dalam rumusan suatu aturan pidana.
2. Tahap Menganalisis Tanggungjawab Pidana Jika seorang terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana melanggar suatu pasal tertentu, hakim menganalisis apakah terdakwa dapat dinyatakan bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya.
3. Tahap Penentuan Pemidanaan Hakim akan menjatuhkan pidana bila unsur- unsur telah terpenuhi dengan melihat pasal Undang-Undang yang dilanggar oleh Pelaku. Dengan dijatuhkannya pidana, Pelaku sudah jelas sebagai Terdakwa.17

Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam persidangan dapat melihat alat bukti yang sah, yaitu :

1. Surat
2. Petunjuk
3. Keterangan terdakwa
4. Keterangan Saksi
5. Keterangan Ahli

Putusan hakim juga berpedoman pada 3 (tiga) hal yaitu:

* 1. Unsur Yuridis, yang merupakan unsur pertama dan utama,
  2. Unsur Filosofis, berintikan kebenaran dan keadilan,

17 Ahmad Rifai, *Penemuan hukum*, Sinar grafika, Jakarta, 2010, Hal. 96

* 1. Unsur Sosiologis, yaitu mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.18

Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang digunakan oleh hakim tersebut. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut 19:

1. Teori Keseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

1. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Pejatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata, pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi daripada pengetahuan dari hakim.

1. Teori Pendekatan Keilmuwan

Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematik dan penuh kehati-hatian

18 <http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/534/jbptunikompp-gdl-arirochman-26694-8-> unikom\_a-v.pdf.

19 Ahmad Rifai, *op.cit*. Hal 102.

khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

1. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari.

1. Teori Ratio Decindendi

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

1. Teori Kebijaksanaan

Aspek teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.

Dalam memutus suatu perkara pidana, seorang hakim harus memutus dengan seadil-adilnya dan harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurut Van Apeldoorn, hakim haruslah:

* 1. Menyesuaikan Undang-Undang dengan faktor-faktor konkrit, kejadian- kejadian konkrit dalam masyarakat.
  2. Menambah Undang-Undang apabila perlu.20

Kebebasan hakim mutlak dibutuhkan terutama untuk menjamin keobjektifan hakim dalam mengambil keputusan. Menurut Soedarto, hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Keputusan mengenai peristiwanya, yaitu apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya,
2. Keputusan mengenai hukumnya, yaitu apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana,
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa dapat dipidana.

Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara pidana hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif (*negative wetterlijke*), yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut Undang- Undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.

# Hal-Hal Yang Memberatkan, Meringankan Dan Menghapuskan Pidana

* 1. Pengertian Pengulangan Tindak Pidana (*Recidive*)

20 E. Utrecht an Moch Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, Hal. 204

Recidive dalam Kamus Hukum diartikan sebagai ulangan kejahatan, kejadian bahwa seseorang yang pernah dihukum karena melakukan suatu kejahatan, melakukan lagi suatu kejahatan. 21

Recidive adalah kelakuan seseorang yang mengulangi perbuatan pidana sesudah dijatuhi pidana dengan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena perbuatan pidana yang telah dilakukanya lebih dahulu. Seseorang yang sering melakukan perbuatan pidana, dan karena dengan perbuatan-perbuatanya itu telah dijatuhi pidana bahkan lebih sering dijatuhi pidana, disebut residivise. Kalau residive menunjukkan pada kelakuan mengulangi perbuatan pidana, maka residivise menunjuk kepada orang yang melakukan pengulangan perbuatan pidana. 22

* + 1. I Made Widnyana Mengatakan bahwa: *residive* itu terjadi apabila seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan terhadap perbuatan pidana tersebut telah dijatuhi dengan putusan hakim. Pidana tersebut telah dijalankan akan tetapi setelah ia selesai menjalani pidana dan dikembalikan kepada masyarakat, dalam jangka waktu tertentu setelah pembebasan tersebut ia kembali melakukan perbuatan pidana.
    2. Zainal Abidin Farid A. Zainal Abidin Farid tampaknya sama dengan pendapat Barda Nawawi Arief dan I Made Widnyana tentang recidive. A. Zainal Abidin Faridm menyatakan bahwa recidive atau pengulangan kejahatan tertentu terjadi bilamana oleh orang yang sama mewujudkan lagi suatu delik, yang diantara oleh putusan pengadilan negeri yang telah memidana pembuat delik. 23

21 Subekti dan Tjitrosoedibjo, *Kamus Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2002, Hal. 94.

22 Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, Hal. 139

23 Tien S. Hulukati, *Hukum Pidana*, Bandung, 2014, Hal. 200

Jadi, recidive itu terjadi apabila seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan terhadap perbuatan pidana tersebut telah dijatuhi dengan putusan hakim. Putusan tersebut telah dijalankan akan tetapi setelah ia selesai menjalani pidana dan dikembalikan kepada masyarakat, dalam jangka waktu tertentu setelah pembebasan tersebut ia kembali melakukan perbuatan pidana. 24

Apabila orang yang telah dijatuhi pidana itu kemudian melakukan lagi perbuatan pidana, maka orang itu telah membuktikan tabiatnya yang kurang baik. Meskipun ia telah dipidana tetapi karena sifatnya yang kurang baik itu, ia kembali melakukan perbuatan pidana. Oleh karena sifatnya yang demikian itu, maka *residivise* perlu dijatuhi pidana lebih berat lagi meskipun ia telah dididik dalam Lembaga Pemasyarakatan agar mereka kemudian setelah kembali ke dalam masyarakat dapat hidup normal sebagai warga masyarakat lainya. Namun bilamana dia melakukan perbuatan pidana lagi maka terhadapnya dapat dikenakan pasal mengenai recidive dengan ancaman pidana yang lebih berat.25

* 1. *Concursus* atau *Samenloop*

*Samenloop* (Belanda) atau disebut juga dengan *Concursus*. Secara istilah yang dimaksud dengan perbarengan ialah terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang di mana tindak pidana yang

24 I Made Widnyanya, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, FIKAHATI ANESKA, 2010,

Hal. 299

25 *Ibid*

dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara tindak pidana yang awal dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu keputusan hakim.26

Sehubung dengan lebih dari satu tindakan pidana yang dilakukan oleh satu orang, *utrecht* mengemukakan tentang 3 (tiga) kemungkinan yang terjadi, yaitu:

1. Terjadi *perbarengan*, dalam hal apabila dalam waktu antara dilakukannya dua tindak pidana tidak telah di tetapkan satu pidana karena tindak pidana yang paling awal di antara kedua tindak pidana itu. Dalam hal ini, dua atau lebih tindak pidana itu akan diberkas dan diperiksa dalam satu perkara dan kepada si pembuat akan dijatuhkan satu pidana, oleh karenanya praktis di sini tidak ada pemberatan pidana, yang terjadi justru peringanan pidana. Misalnya dua kali pembunuhan (Pasal 338) tidaklah dipidana dua kali yang masing-masing dengan pidana penjara maksimum 15 (lima belas) tahun, tetapi cukup dengan satu pidana penjara dengan maksimum 20 tahun (15 tahun ditambah sepertiganya, Pasal 65).
2. Apabila tindak pidana yang lebih awal telah diputus dengan mempidana pada si pembuat oleh hakim dengan putusan yang telah menjadi tetap, maka di sini terdapat *pengulangan*. Pada pemidanaan si pembuat karena tindak pidana yang kedua ini

26 Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana,* Jakarta, P.T. sofmedia, 2012. hal 333

terjadi pengulangan, dan di sini terdapat pemberatan pidana dengan sepertiganya.

1. Dalam hal tindak pidana yang dilakukan pertama kali telah dijatuhkan pidana pada si pembuatnya, namun putusan itu belum mempunyai kekuatan hukum pasti, maka di sini *tidak terjadi perbarengan maupun pengulangan,* melainkan tiap-tiap tindak pidana itu dijatuhkan sendiri-sendiri sesuai dengan pidana maksimum masing-masing yang diancamkan pada beberapa tindak pidana tersebut.27
   1. Penghapusan Pidana

Alasan penghapus pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan berbagai keadaan pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang yang seharusnya dipidana, akan tetapi tidak dipidana. Hakim dalam hal ini, menempatkan wewenang dalam dirinya (dalam mengadili perkara yang konkret) sebagai pelaku penentu apakah telah terdapat keadaan khusus dalam diri pelaku, seperti dirumuskan dalam alasan penghapus pidana. 28

Dalam hal ini sebenarnya pelaku atau terdakwa sudah memenuhi

semua unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam peraturan hukum pidana, akan tetapi ada beberapa alasan yang dapat menyebabkan

27 *Ibid*

28 M. Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2012, Hal. 27.

pelaku tidak dipidana, atau dikecualikan dari penjatuhan sanksi pidana. Dengan demikian alasan-alasan penghapus pidana ini adalah alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang sebenarnya telah memenuhi rumusan delik, untuk tidak dipidana, dan ini merupakan kewenangan yang diberikan Undang-Undang kepada hakim.29 Berbeda halnya dengan alasan yang dapat menghapuskan tentang penuntutan, alasan penghapus pidana itu diputuskan oleh hakim dengan menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan hapus atau kesalahan pembuat tersebut hapus, karena ada ketentuan Undang-Undang dan hukum yang membenarkan peraturan atau yang memaafkan pembuat.

Pembentuk Undang-Undang telah menetapkan sejumlah alasan penghapus pidana umum dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP sendiri tidak memberikan pengertian yang jelas tentang makna dari alasan penghapus pidana itu. Di dalam KUHP, pada buku kesatu bab III terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang hal-hal yang menghapuskan pemidanaan terhadap seorang terdakwa.

Menurut sejarahnya yaitu melalui M.v.T (*Memorie van Toelichting*) mengenai alasan penghapus pidana, menyebutkan apa yang disebut dengan alasan-alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang atau alasan-alasan tidak dapat

29 *Ibid*

dipidananya seseorang. Hal ini berdasarkan dua alasan sebagai berikut:

* + 1. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak pada diri orang tersebut.
    2. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak diluar dari diri orang tersebut.30

Dari kedua alasan yang ada dalam MvT (*Memorie van Toelichting*) tersebut, menimbulkan kesan bahwa pembuat Undang- Undang dengan tegas merujuk pada penekanan tidak dapat dipertanggungjawabkannya orang, tidak dapat dipidananya pelaku atau pembuat, bukan tidak dapat dipidananya tindakan atau perbuatan. Hal ini dipertegas lagi dalam Pasal 58 KUHP yang menyatakan bahwa “keadaan diri yang menyebabkan penghapusan, pengurangan, atau penambahan hukumannya hanya boleh dipertimbangkan terhadap yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan itu atau diri si pelaku saja.”

Alasan penghapus pidana dapat dilihat dari sudut unsur-unsur delik delik, yaitu unsur-unsur subjektif dan unsur objektif. Dari unsur subjektif, yaitu dari dalam diri pribadi si pelaku itu sendiri, karena alasan penghapus pidana yang merupakan alasan pemaaf adalah merupakan alasan yang menghapuskan kesalahan dari si pelaku. Oleh karena hal ini menyangkut dari dalam diri pribadi atau pelaku, maka

30 *Ibid*, Hal. 28.

alasan penghapus pidana ini termasuk alasan penghapus pidana sebagai unsur subjektif. Sedangkan dari sudut unsur objektif, yaitu unsur yang berada di luar diri pribadi pelaku yang menyangkut tentang perbuatan, yang merupakan alasan pembenar. Dalam hal ini sifat melawan hukum perbuatan pelaku yang dihapuskan. Oleh karena hal ini menyangkut keadaan di luar diri pribadi pelaku, maka alasan penghapus pidana ini termasuk alasan penghapus pidana sebagai unsur objektif. 31

Pembagian alasan penghapus pidana dengan cara memisahkan antara alasan pemaaf dengan alasan pembenar ini juga dapat dilihat dari pandangan atau aliran dualistis dalam hukum pidana yang berbeda dengan aliran atau pandangan monistis. Menurut pandangan dualistis untuk adanya syarat-syarat penjatuhan pidana terhadap pelaku diperlukan lebih dahulu pembuktian adanya perbuatan pidana (sebagai unsur objektif), lalu sesudahnya itu dibuktikan kesalahan pelaku (sebagai unsur subjektif). Kedua hal ini sama pentingnya untuk dijadikan hakim sebagai dasar dalam menjatuhkan pidana. 32

# Jenis-Jenis Putusan

Putusan Hakim dalam acara pidana terbagi menjadi tiga macam putusan yaitu:33

1. Putusan Bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHAP)

31 *Ibid*, Hal 29

32 A.Z. Abidin, *Bunga Rampai Hukum Pidana,* Jakarta, Pradnya Paramita, 1983, Hal. 48.

33 M Yahya Harahap, *Pembahasan dan Peenrapan KUHAP*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005. hal

358

Putusan Bebas merupakan Putusan Pengadilan yang di jatuhkan kepada terdakwa karena dari hasil pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang di dakwakan kepadanya dinyatakan tidak terbukti sacara sah dan meyakinkan. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.

Dari ketentuan tersebut di atas, berarti putusan bebas ditinjau dari segi yuridis ialah putusan yang dinilai oleh majelis hakim tidak memenuhi asas pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif, artinya dari pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu. Selain itu juga tidak memenuhi memenuhi asas batas minimum pembuktian, artinya kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, sedang menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP, agar cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa, harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

1. Putusan Lepas dari segala Tuntutan Hukum

Merupakan putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan ternyata menurut pendapat pengadilan,

perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan satu tindak pidana.(Pasal 191 ayat (2) KUHAP).

Jenis putusan ini dasar hukumnya dapat di temukan dalam Pasal

191 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan: “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang di dakwakan kepada terdakwa terbukti,tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa di putus lepas dari segala tuntutan”.

1. Putusan yang mengandung pemidanaan

Merupakan putusan yang membebankan suatu pidana kepada terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan itu.(Pasal 193 ayat (1) KUHAP).

Dasar putusan ini adalah Pasal 193 ayat (3) KUHAP yang menyebutkan:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

# BAB III TINJAUAN UMUM

# Tinjauan Tentang Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur- unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam Undang-Undang menurut KUHP. Seperti yang terdapat dalam Pasal 55 (1) KUHP yang menyebutkan:

* 1. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
     1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
     2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP (1) di atas, bahwa pelaku tindak pidana itu dapat dibagi dalam 4 (empat) golongan:

1. Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*pleger*)

Dari berbagai pendapat para ahli dan dengan pendekatan praktik dapat diketahui bahwa untuk menentukan seseorang sebagai yang melakukan (*pleger*)/pembuat pelaksana tindak pidana secara penyertaan adalah dengan 2 (dua) kriteria:

* 1. Perbuatannya adalah perbuatan yang menetukan terwujudnya tindak pidana
  2. Perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana. 34

1. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doen pleger*).

Undang-Undang tidak menjelaskan tentang siapa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan itu. Pengertian dan syarat untuk dapat ditentukan sebagai orang yang melakukan (*doen pleger*) pada umumnya para ahli hukum merujuk pada keterangan yang ada dalam *MvT WvS* Belanda, yang menyebutkan bahwa yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak pidana, tapi tidak secara pribadi melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat didalam tangannya apa bila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggung jawab, karena sesuatu hal yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan.

* 1. Orang lain sebagai alat didalam tangannya.

Yang dimaksud dengan orang lain sebagai alat di dalam tangannya adalah apabila orang/pelaku tersebut memperalat orang lain untuk melakukan tindak pidana. Karena orang lain itu sebagai alat, maka secara praktis pembuat penyuruh tidak melakukan perbuatan aktif.

Doktrin hukum pidana orang yang diperalat disebut sebagai *manus ministra* sedangkan orang yang memperalat disebut sebagai manus

34 Usman Simanjuntak, *Teknik penuntutan dan upaya hukum*, Jakarta: Bina cipta, 1994, Hlm

95.

domina juga disebut sebagai *middelijke dader* (pembuat tidak langsung).

Ada tiga konsekuensi logis terhadap tindak pidana yang dilakukan dengan cara memperlalat orang lain:

* + 1. Terwujudnya tindak pidana bukan disebabkan langsung oleh pembuat penyuruh, tetapi leh perbuatan orang lain (*manus ministra*).\
    2. Orang lain tersebut tidak bertanggungjawab atas perbuatannya yang pada kenyataannya telah melahirkan tindak pidana.
    3. Manus ministra ini tidak boleh dijatuhi pidana, yang dipidana adalah pembuatan penyuruh.
  1. Tanpa kesengajaan atau kealpaan

Yang dimaksud dengan tanpa kesengajaan atau tanpa kealpaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang disuruh (*manus ministra*) tidak dilandasi oleh kesengajaan untuk mewujudkan tindak pidana, juga terjadinya tindak pidana bukan karena adanya kealpaan, karena sesungguhnya inisiatif perbuatan datang dari pembuat penyuruh, demikian juga niat untuk mewujudkan tindak pidana itu hanya berada pada pembuat penyuruh (*doen pleger*).

* 1. Karena tersesat

Yang dimaksud dengan tersesatkan disini adalah kekeliruan atau kesalahpahaman akan suatu unsur tindak pidana yang disebabakan oleh

pengaruh dari orang lain dengan cara yang isinya tidak benar, yang atas kesalahpahaman itu maka memutuskan kehendak untuk berbuat.

* 1. Karena kekerasan

Yang dimaksud dengan kekerasan (*geweld*) di sini adalah perbuatan yang dengan menggunakan kekerasan fisik yang besar, yang in casu ditujukan pada orang, mengakibatkan orang itu tidak berdaya.

Apa yang telah diterangkan di atas maka jelaslah bahwa orang yang disuruh melakukan tidak dapat dipidana. Di dalam hukum orang yang disuruh melakukan ini dikategorikan sebgai manus ministra, sementara orang menyuruh melakukan dikategorikan manus domina. Menurut Moeljatno, kemungkinan-kemungkinan tidak dipidananya orang yang disuruh, karena:

* + 1. Tidak mempunyai kesengaaan, kealpaan ataupun Kemampuan bertanggungjawab;
    2. Berdasarkan Pasal 44 KUHP;
    3. Daya paksa Pasal 48 KUHP;
    4. Berdasarkan Pasal 51 ayat (2) KUHP dan
    5. Orang yang disuruh tidak mempunyai sifat/kualitas yang disyaratkan dalam delik, misalnya Pasal 413- 437 KUHP.35

1. Orang yang turut melakukan tindak pidana (*made pleger*).

KUHP tidak memberikan rumusan secara tegas siapa saja yang dikatakan turut melakukan tindak pidana, sehingga dalam hal ini menurut

35 Moeljatno, *Asas-asas hukum pidana*, Jakarta, Rneka cipta, 2002, Hal 56.

doktrin untuk dapat dikatakan turut melakukan tindak pidana haru memenuhi dua syarat:

1. Harus adanya kerjasama secara fisik
2. Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerjasama untuk melakukan tindak pidana.

MvT menjelaskan bahwa yang turut serta Melakukan (*medepleger*) ialah setiap orang yang sengaja berbuat (*meedoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana. Penelasan MvT ini, merupakan penjelasan yang singkat yang masih membutuhkan penjabaran lebih lanjut.

Dari berbagai pandangan para ahli tentang bagaimana kategori untuk menentukan pembuat peserta (*medepleger*), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk menentukan seseorang sebagai pembuat peserta yaitu apabila perbuatan orang tersebut memang mengarah dalam mewujudkan tindak pidana dan memang telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana (*pleger*) untuk mewujudkan tindak pidana tersebut.

Perbuatan pembuat peserta tidak perlu memenuhi seluruh unsur tindak pidana, asalkan perbuatannya memiliki andil terhadap terwuudnya tindak pidana tersebut, serta di dalam diri pembuat pesertatelah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana untuk mewujudkan tindak pidana.36

1. Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uitlokken*).

36 *Ibid,* Hal 86

Syarat-syarat *uit lokken* :

1. Harus adanya seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana.
2. Harus ada orang lain yang digerakkan untuk melakukan tindak pidana.
3. Cara menggerakan harus menggunakan salah satu daya upaya yang tersebut didalam Pasal 55 (1) sub 2e (pemberian,perjanjian, ancaman, dan lain sebagainya).
4. Orang yang digerakan harus benar-benar melakkan tindak pidana sesuai dengan keinginan orang yang menggerakan.

Ditinjau dari sudut pertanggung jawabannya maka Pasal 55(1) KUHP tersebut diatas kesemua mereka adalah sebagai penanggung jawab penuh, yang artinya mereka semua diancam dengan hukuman maksimum pidana pokok dari tindak pidana yang dilakukan.

# Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian merupakan kejahatan yang sangat umum terjadi ditengah masyarakat dan merupakan kejahatan yang dapat dikatakan paling meresahkan masyarakat. Di sebutkan dalam Pasal 362 KUHP bahwa:

Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Pencurian mempunyai beberapa unsur, yaitu :

1. Unsur objektif, terdiri dari:
   1. Perbuatan mengambil
   2. Objeknya suatu benda
   3. Unsur keadaan yang menyertai/melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain.
2. Unsur subjektif, terdiri dari :
   1. Adanya maksud
   2. Yang ditujukan untuk memiliki
   3. Dengan melawan hukum Suatu perbuatan atau peristiwa, baru dapat dikatakan sebagai pencurian apabila terdapat semua unsur tersebut diatas.37

Dari adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan- gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari- jari dan tangan yang kemudian diarahakan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ketempat lain atau kedalam kekuasaannya.

Sebagaimana banyak tulisan, aktifitas tangan dan jari-jari sebagaimana tersebut di atas bukanlah merupakan syarat dari adanya perbuatan mengambil. Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada

37 Adami Chazawi*, Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang: Bayu Media, 2003, Hal. 5

perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak.

Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna. Kekuasaan benda apabila belum nyata dan mutlak beralih ke tangan si petindak, pencurian belum terjadi, yang terjadi barulah percobaan mencuri. Dari perbuatan mengambil berakibat pada beralihnya kekuasaan atas bendanya saja, dan tidak berarti juga beralihnya hak milik atas benda itu ke tangan petindak. Oleh karena untuk mengalihkan hak milik atas suatu benda tidak dapat terjadi dengan perbuatan yang melanggar hukum, melainkan harus melalui perbuatan-perbuatan hukum, misalnya dengan jalan jual beli,

hibah dan lain sebagainya38

Bilamana dapat dikatakan seseorang telah selesai melakukan perbuatan mengambil, atau dengan kata lain ia dalam selesai memindahkan kekuasaan atas sesuatu benda dalam tangannya secara mutlak dan nyata. Orang yang telah berhasil menguasai suatu benda, ialah bila ia dapat melakukan segala macam perbuatan terhadap benda itu secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu.

38 *ibid*, Hal 7

Mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda- benda bergerak (*rorend goed*) dan benda-benda berwujud (*stoffelijk goed*). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud saja.

Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik petindak itu sendiri. Seperti sebuah sepeda milik A dan B, yang kemudian A mengambilnya dari kekuasaan B lalu menjualnya. Akan tetapi bila semula sepeda tersebut telah berada dalam kekuasaannya kemudian menjualnya, maka bukan pencurian yang terjadi melainkan penggelapan.39

Jadi benda yang dapat menjadi obyek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya. Benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian. Mengenai benda-benda yang tidak ada pemiliknya ini dibedakan antara:

1. Benda-benda yang sejak semula tidak ada pemiliknya, disebut *res nulius*, seperti batu di sungai, buah-buahan di hutan.
2. Benda-benda yang semula ada pemiliknya, kemudian kepemilikannya itu dilepaskan, disebut *resderelictae*. Misalnya sepatu bekas yang sudah dibuang di kotak sampah.40

Mengenai apa yang dimaksud dengan hak milik ini, adalah suatu pengertian menurut hukum, baik hukum adat maupun menurut hukum

39 *Ibid,* Hal 11

40 *Ibid,* Hal 20

perdata. Walaupun pengertian hak milik menurut hukum adat dan menurut hukum perdata pada dasarnya jauh berbeda, yaitu sebagai hak yang terkuat dan paling sempurna, namun karena azas dalam peralihan hak itu berbeda, menyebabkan kadang-kadang timbul kesulitan untuk menentukan siapa pemilik dari suatu benda.

Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud/*opzetals oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya.

Dari gabungan kedua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja.

# BAB IV PEMBAHASAN

1. **Penerapan Hukum Pidana Materil terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan secara bersama-sama**

Dalam menangani tindak pidana pencurian, baik korban maupun pelaku harus tunduk pada hukum. Pengadilan harus mempertimbangkan dan memutuskan bagaimana menghukum orang yang melakukan kejahatan mencuri berdasarkan persyaratan Undang-Undang dan Undang-Undang setempat lainnya yang relevan dengan situasi tersebut.

# Kronologi Kasus

Tersangka **BUDI HERYANTO Als BUDI Bin M.SAFE’I** bersama – sama dengan tersangka a.n. **BUDI Anak dari ALIUDIN**, dituding melakukan pencurian dengan cara ditimbang (curat) pada Sabtu, 7 Mei 2022, sekitar pukul 09.00 WIB di Jln. HMO Bafadhal No.17 Rt. 07 Kel. Cempaka Putih Kec. Kota Jelutung, Jambi. Ketika pelaku menambah rekening korban pada Sabtu, 7 Mei 2022, sekitar pukul 09.00 WIB, mereka berdua bersama tersangka. Pada 19 Januari 2022, akan dibebani di Jln. HMO Bafadhal No.17 Rt. 07 Kel. Cempaka Putih Kec. Kota Jelutung Jambi tanpa persetujuan pemilik. Saksi mata korban berangkat ke Kebatam, Lalu pada Tanggal 06 Mei 2022 sekira pukul 18:00 wib saksi korban pulang kerumah lalu kemudian Saksi korban Langsung Membuka pintu rolingdor Saksi korban Akan Tetapi Pintu Saksi korban Tidak Bisa Terbuka Dan Saksi korban Melihat Ada Bayangan Gembok Yang Terkunci Dari Dalam, Kemudian

Saksi korban Langsung Kebelakang Rumah Dan Memanjat Pakai Kursi Lalu saksi korban Melihat Lampu Di Ruang Makan rumah Saksi korban Hidup, kemudian Saksi korban Bergegas Pergi Kedepan Dan Saksi korban Yakin Rumah Saksi korban Sudah dimasukan orang lalu Kemudian Saksi korban Langsung bergegas pergi kerumah Orang Tua Saksi korban Yang beralamat di Thehok Dan Saksi korban MenginapDisana, Saksi korban dan saksi I NETI kemudian bersepakat untuk bertemu di rumah saksi korban yaitu di Jln Hmo Bafadhal No 17 Rt 07 kel, Cempaka putih Kec. Jelutung Kota Jambi Prov. Jambi, keesokan harinya, Sabtu, 7 Mei 2022, sekitar pukul 09.00 WIB. Sementara itu, saksi BADRUN datang menjemput saksi korban. Saksi korban dan saksi II BADRUN kemudian bergegas menuju rumah saksi korban yang beralamat di Jln Hmo Bafadhal No 17 Rt 07 kel. Cempaka Putih Kec. Kota Jelutung Jambi., Setelah Tiba Dirumah Saksi korban Kemudian Datang saksi I NETI lalu Saksi korban Dan saksi I NETI Dan saksi II BADRUN Masuk Kerumah Dan Saksi korban Mencoba Masuk Dengan Cara Memotong Tralis kemudian saksi korban Mendobraak Pintu Yang Terkunci Dari Dalam, Kemudian Settelah Terbuka Saksi korban Dan saksi I NETI Dan saksi II BADRUN langsung Masuk Dan Saksi korban Melihat Rumah sudah dalam Keadaan Berantakan Lalu Kemudian Saksi korban dan saksi I NETI Dan saksi II BADRUN Langsung Mengecek Barang Barang saksi korban sudah hilang di curi pelaku berupa :

* + - 1 (satu) unit cooker merk MITO
    - 1 (satu) set Playstation 1 warnaputih
    - 1 (satu) VCD compac disc merk PIONEER + remote
    - 1 (satu) unit pemanggang Roti merk HARUMI
    - 1 (satu) Unit pemanggang roti merk PHILIPS CUCINA
    - 1 (satu) unit kipasangin merk PANASONIC
    - 1 (satu) Unit mesin air Steam merk CLEAN MATIC
    - 1 (satu) buahkuali merk ROYAL VKB
    - 1 (satu) Buahpanci merk VIVO
    - 1 (satu) set alatpembersihlantai merk LION STAR LIVINA
    - 1 (satu) buahSarungteropongwarnahitam
    - 1 (satu) buahresiver parabola merk AKIRA
    - 1 (satu) buah remote TV merk LG
    - 1 (satu) Buahtaswarnabiru merk BCA
    - 1 (satu) unit alatmesage / pijatrefleksi.
    - 1 (satu) Unit televisi merk LG ukuran 32 Inchi + breket
    - 1 (satu) Unit kipasangin merk nasional
    - 2 (dua) buahtabung gas ukuran 12 Kg
    - 1 (Satu) buahakimobil
    - 2 (dua) buah blender
    - 1 (satu) buah rice cooker
    - 1 (satu) unit Air fryer
    - 1 (satu) Unit vacum cleaner
    - 1 (satu) Lembar STNK asli dan KIR mobil
    - 1 (satu) Set tape compo + Speaker
    - 1 (satu) buah box wifi,

Sudah Hilang Diambil Oleh pelaku Tindak Pidana tersebut, lalu kemudian Tersangka Dan Sdri NETI Dan Sdra BADRUN Langsung Bergegas Melaporkan Kejadian Tersebut Kepolsek Jelutung guna Pengusutan Lebih Lanjut.

# Identitas Terdakwa

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nama lengkap | : | BUDI HERYANTO Alias BUDI Bin M.  SAFE’I |
| Tempat lahir | : | Jambi |
| Umur/tanggal lahir | : | 39 Tahun / 22 Oktober 1982 |
| Jenis kelamin | : | Laki-Laki |
| Kebangsaan/Kewarganegaraan | : | Indonesia |
| Tempat Tinggal | : | Jln. Kirana II No. 91 RT. 11 Kelurahan  Cempaka Putih Kecamatan Jelutung Kota Jambi Provinsi Jambi |
| Agama | : | Islam |
| Pekerjaan | : | Tukang parkir |
| Pendidikan | : | SMP (Tidak tamat) |

**Terdakwa II**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nama lengkap | : | BUDI Anak Dari ALIUDIN |
| Tempat lahir | : | Jambi |
| Umur/tanggal lahir | : | 30 Tahun / 12 November 1991 |
| Jenis kelamin | : | Laki-Laki |
| Kebangsaan/Kewarganegaraan | : | Indonesia |
| Tempat Tinggal | : | Jln. HMO. Bafadal RT. 07 Kelurahan Cempaka Putih Kecamatan Jelutung Kota Jambi Provinsi Jambi |
| Agama | : | Budha |
| Pekerjaan | : | Buruh Bangunan |
| Pendidikan | : | SMP (tamat) |

# Dakwaan Penuntut Umum

1. **Putusan Nomor : 346/ Pid.B / 2022 /PN.Jmb**

# Dakwaan

Bahwa pada tanggal 1 Februari 2022, kurang lebih pada pukul

13.00 WIB telah hadir Tergugat I BUDI HERYANTO alias BUDI Bin

M. SAFE'I dan Terdakwa II BUDI Anak dari ALIUDIN, atau setidak- tidaknya di tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Kejaksaan Kejaksaan Agung, Jalan HMO Bafadal No. 17 RT. 07 Desa Cempaka Putih, Kecamatan Jelutung, Jambi,

## Ketika dua orang atau lebih bekerja sama untuk mencuri sesuatu dari orang lain dan melakukannya pada malam hari di rumah atau halaman tertutup di mana ada rumah, tanpa sepengetahuan atau persetujuan pemilik, dan untuk mendapatkan barang curian dengan menghancurkan, memotong, atau memanjat, atau dengan menggunakan kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian posisi palsu, Adapun cara-cara yang dilakukan para Terdakwa tersebut sebagai berikut:

* Berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar tengah hari WIB, Terdakwa I Budi Herianato melintas di depan rumah saksi yang beralamat di Jalan HMO Bafadal No. 17 RT. 07 Desa Cempaka Putih, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, Provinsi Jambi., dan Terdakwa I melihat keadaan rumah tersebut sedang kosong, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022,

Terdakwa I BUDI HERYANTO mengajak Terdakwa II BUDI untuk mengambil barang-barang yang ada dirumah milik saksi JOKO YANTO dengan mengatakan “Bud, rumah tu kosong ayolah kita beraksi” dan atas ajaka Terdakwa I tersebut, Terdakwa II menyetujuinya dengan mengatakan “Ayolah”.

* Pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 pukul 13.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II mendatangi rumah Saksi JOKO YANTO. Sesampainya di sana, Terdakwa I dan Terdakwa II memanjat pagar samping dan langsung menuju loteng lantai 2 tanpa sepengetahuan dan persetujuan Saksi JOKO YANTO, lalu turun kebawah namun saat itu pintu rumah saksi JOKO YANTO dalam keadaan terkunci, selanjutnya para Terdakwa membuka paksa teralis jendela rumah tersebut dengan menggunakan linggis yang telah dipersiapkan sebelumnya.
* Bahwa setelah teralis jendela dibuka, para terdakwa masuk ke dalam dan langsung mencari barang-barang saksi JOKO YANTO., lalu, Terdakwa I menemukan 1 (satu) unit Vacum Cleaner, selanjutnya dibawa keatas loteng rumah dengan menggunakan seutas tali, dan dengan cara yang sama selanjutnya para Terdakwa juga mengambil barang-barang berupa, 1 (satu) unit tv 32 inc merk lg berseta breket dan, 1 buah tabung gas dan 1 buah blander, box wifi dan kir mobil dan stnk mobil, 1 (satu) set tape compo + speaker, 1 (satu) buah toaster merek Harumi, 1

(satu) buah toaster merek Philips Cucina, 1 (satu) set kunci rumah, toko, dan mobil, 1 (satu) tas merek BCA warna biru, 1 (satu) unit alat pijat/reflexology , 1 (satu) unit penerima bola merk Akira, 1 (satu) remote TV merk LG, 1 (satu) tutup teropong hitam, dan 1 tabung gas, 1 blander, dan 1 mobil aki.

* Bahwa selanjutnya para Terdakwa membawa barang-barang tersebut melalui loteng rumah milik saksi JOKO YANTO, dan keluar dari pagar samping, kemudian dibawa kerumah Terdakwa I, lalu pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 para Terdakwa kembali kerumah saksi JOKO YANTO dan tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi JOKO YANTO, Para terdakwa menyita 1 (satu) buah vcd compact disc merk pioneer + remote, 1 (satu) buah mesin steam air merk clean matic, 1 (satu) kuali merk royal vkb, 1 (satu) set alat pembersih lantai merk lion star livina , 1 (satu) penutup teropong hitam, 1 (satu) penanak nasi, dan 1 (satu) unit penggoreng udara. Mereka kemudian membawa barang- barang tersebut ke kediaman terdakwa II.
* Bahwa saksi Joko Yanto mengalami kerugian sebesar Rp

20.000.000 akibat perbuatan terdakwa.

* ***Menurut Pasal 363(2) KUHP, kegiatan para Terdakwa tersebut dilarang dan dapat dihukum.***

# PUTUSAN

Memperhatikan Pasal 363(2) KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 KUHAP, dan Undang-Undang dan aturan lain yang relevan;

# MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum terhadap **Terdakwa I BUDI HERIANTO** alias **BUDI Bin M. SAFE'I** dan **Terdakwa II BUDI** Anak **ALIUDIN** telah berkekuatan hukum tetap untuk membuktikan bahwa para terdakwa melakukan tindak pidana pencurian sedangkan keadaannya semakin parah ;
2. Setiap anak dari ALIUDIN mendapat hukuman penjara satu tahun sepuluh bulan.;
3. Diputuskan bahwa hukuman itu dikurangi sepenuhnya untuk memperhitungkan waktu yang dihabiskan para terdakwa dalam tahanan dan dalam tahanan setelah penangkapan mereka;
4. Mensyaratkan agar para terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan pembuktian dengan cara sebagai berikut:
   * 1 (satu) unit alat masak merk MITO
   * 1 (satu) konsol Playstation 1 warna putih
   * 1 (satu) VCD Pioneer dengan remote
   * 1 (satu) unit pemanggang merk HARUMI
   * 1 (satu) unit pemanggang lainnya CUCINA, Philip
   * 1 (satu) kipas angin dengan merk PANASONIC
   * 1 (satu) unit air steam Cleanmatic
   * 1 (satu) kuali merk ROYAL VKB
   * 1 pot merek VIVO;
   * 1 set pembersih lantai merk LION STAR LIVINA;
   * 1 penutup untuk teropong hitam.
   * 1 (satu) remote TV LG dan 1 (satu) receiver parabola AKIRA
   * 1 (Satu) tabung gas, ukuran 12 kg
   * 1 (satu) tas merek BCA biru, dan
   * 1 (satu) penanak nasi dari MITOCHIBA

## Dikembalikan kepada saksi JOKO YANTO Als JOKO Anak Dari THAMSIR LIGA

1. Mengenakan denda sebesar Rp 5.000 kepada pelaku untuk menutup biaya perkara sebesar Rp 5.000;

# ANALISIS PENULIS

Menurut penulis, putusan majelis hakim dalam perkara 346/Pid.B/2022/PN.Jmb belum cukup memuaskan rasa keadilan korban setelah membaca dan memeriksanya. karena besarnya kerugian. Para tersangka juga memiliki riwayat kejahatan. Menurut penulis Hukum Acara Pidana, Apabila pelakunya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum,

maka ia akan dihukum sesuai dengan delik yang dilakukannya (Pasal 193 ayat (1) KUHP).41

Selain itu, Samenloop (Belanda) atau Concursus. Persetujuan, sebagaimana didefinisikan, mengacu pada pelaksanaan dua atau lebih kejahatan oleh satu orang di mana pelanggaran pertama tidak dituntut atau di mana tidak ada perintah pengadilan yang melarang hubungan antara kejahatan pertama dan kejahatan berikutnya..42

Utrecht mengusulkan tiga hasil potensial dalam kasus beberapa kejahatan yang dilakukan oleh satu orang, yaitu:

* 1. Kejadian serentak, dalam hal belum diketahui satu kejahatan dalam selang waktu antara dilakukannya dua kejahatan karena terjadi lebih dulu . Pada dasarnya tidak ada kejengkelan kriminal di sini; sebaliknya, hukumannya diringankan. Hal ini karena beberapa kejahatan akan dicatat, diselidiki, dan diadili dalam satu kasus, dan pelaku hanya akan menerima satu hukuman. Misalnya, dua pembunuhan (Pasal 338) hanya diancam dengan satu pidana penjara, dengan pidana penjara paling lama masing-masing 15 (lima belas) tahun., namun hanya satu hukuman penjara maksimum 20 tahun (15 tahun ditambah sepertiga, Pasal 65).43
  2. Ketika seseorang melakukan kejahatan baru setelah dinyatakan bersalah atas pelanggaran sebelumnya, menerima hukuman, dan

*41* Ahmad Rifai*,Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif,* Cet.1, Sinar Grafika, Jakarta,2010, hal.115-117.

42 Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana,* Jakarta, P.T. sofmedia, 2012, Hal. 333

43 Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana,* Jakarta, P.T. sofmedia, 2012, Hal. 333

menyelesaikan masa itu, ini dikenal sebagai residivisme, terkadang dikenal sebagai pelanggaran berulang.

* 1. Orang yang telah melakukan kejahatan lebih dari satu kali biasanya disebut sebagai "residivis" atau "residivis", dan anggota parlemen percaya bahwa sangat penting untuk menghukum mereka lebih keras daripada penjahat yang hanya melakukan kejahatan satu kali.44

Namun, hakim memvonis para pelaku dengan pidana penjara satu tahun sepuluh bulan dengan nomor perkara 346/Pid.B/2022/PN.Jmb. Hal ini menjelaskan bahwa keputusan dan hukum pidana bertentangan satu sama lain. Mengingat para terdakwa dalam kasus tindak pidana pencurian ini merupakan Putusan majelis hakim membebaskan para terdakwa meskipun pelaku dan korban yang berulang kali mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- akibat perbuatan tergugat masih dipandang tidak wajar. Hukuman berfungsi sebagai pencegah bagi pelaku agar tidak mengulangi kejahatan yang sama dan sebagai peringatan bagi orang lain agar tidak melakukan hal yang sama. Penulis mengklaim bahwa hukuman penjara 1 tahun 10 bulan bagi para terdakwa residivis cukup ringan.

# Pertimbangan Hukum oleh Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Bersama-sama

Untuk menjelaskan landasan pertimbangan hakim, penulis akan terlebih dahulu menjelaskan apa yang dimaksud dengan “Tugas Hakim”. Untuk kepentingan penyelesaian perselisihan atau perselisihan Tugas hakim adalah

44 *Ibid*, hal: 331

memberikan putusan dalam setiap perkara atau perselisihan yang dihadapinya secara tidak memihak dan sesuai dengan hukum. Ia juga harus memastikan hal- hal seperti hubungan hukum para pihak, pentingnya tindakan mereka berdasarkan hukum, dan sikap hukum masing-masing. Hakim harus selalu bertindak tidak memihak dan independen dari semua pihak, terutama saat membuat penilaian.45

Tiga bagian kewenangan hakim dalam memutus suatu perkara adalah sebagai berikut: a.) Menerima laporan yang telah diajukan kepada hakim dan meminta keterangan dan pembuktian. b) Hati-hati membaca berkas perkara terdakwa. c.) Tetapkan hukuman untuk kasus yang diperiksa dan diadili oleh pengadilan. Pelaksanaan kewenangan ini oleh hakim menandai puncak dari penyelidikan dan persidangan pengadilan atas masalah tersebut. Hal ini terutama berlaku ketika menggugat keputusan hakim.

Oleh karena itu, tentunya hakim harus mempertimbangkan semua faktor yang relevan dalam mengambil keputusan, termasuk dakwaan, kesaksian hakim selama persidangan, dan dampak persidangan terhadap masyarakat. Tugas hakim adalah menganalisis, mengadili, dan memutus perkara dengan memperhatikan putusan pengadilan dan dalil-dalilnya.46

Sesuai dengan Pasal 183 KUHAP, pengadilan tidak dapat menemukan terdakwa bersalah melakukan kejahatan tanpa setidaknya dua alat bukti yang kredibel yang menunjukkan bahwa terdakwa benar-benar melakukan pelanggaran tersebut. Untuk memberikan kejelasan hukum kepada masyarakat, dibuatlah Pasal 183 KUHAP (penjelasan Pasal 183 KUHAP). Pasal 184 KUHAP, yang mengatur tentang alat bukti yang dapat diterima, mengatur bahwa agar alat bukti dapat dianggap dapat diterima, sekurang-kurangnya harus ada dua alat bukti yang dapat diandalkan. (1) Unsur-unsur KUHAP yang tercantum di bawah ini merupakan alat bukti yang dapat dipercaya: (a) keterangan saksi, (b)

45 Wildan Suyuthi Mustofa, “Kode Etik Hakim, Edisi Kedua”, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013),

halaman 74.

46 Bambang Waluyo, “Pidana dan Pemidanaan”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), halaman 80.

keterangan ahli, (c) surat, dan (d) petunjuk; (e). pernyataan dari tergugat atau apapun yang diyakini secara luas dan tidak perlu dibuktikan.

Kasus pidana diakhiri dengan keputusan pengadilan; oleh karena itu, hakim harus mempertimbangkan kriteria selain kriteria hukum untuk menilai apakah putusan tersebut konsisten dengan delik yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Putusan hakim dengan demikian mencerminkan asas-asas sosiologis, filosofis, dan hukum sebagai satu kesatuan:

1) Pertimbangan Yuridis

Hakim membuat putusan berdasarkan syarat formal peraturan perundang-undangan karena pertimbangan yurisprudensi. Menurut Undang-Undang, hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman kecuali setidaknya ada dua alat bukti yang dapat dipercaya yang membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana dan memang benar dilakukan (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti yang sah terdiri dari: (a) pernyataan yang dibuat oleh terdakwa atau fakta-fakta yang diketahui dengan baik dan tidak memerlukan pembuktian; (b) keterangan ahli; (c) surat; (d) instruksi; (e) pernyataan saksi; (Pasal 184). Terdakwa juga diduga melakukan tindak pidana berdasarkan unsur-unsur tindak pidana yang diduga dilakukannya.

Faktor hukum yang menjadi pertimbangan dalam pengambilan putusan perkara 346/Pid.B/2022/PN.Jmb adalah sebagai berikut:

Karena perbuatan para terdakwa dalam perkara 346/Pid.B/2022/PN.Jmb tidak sah dan diancam dengan pidana penjara, maka terdakwa I Budi Heryanto Alias Budi Bin M.Safe'I dan terdakwa

II Budi Anak Dari Aliudin dinyatakan bersalah melakukan kejahatan Sesuai dengan Pasal 363 Ayat 2 KUHP, paling lama tujuh tahun. Mengingat unsur-unsur dakwaan penuntut umum yang telah sah berdasarkan Pasal 82(2) UU RI Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

* 1. Unsur “**Barang Siapa**“ :

1. Bahwa Terdakwa I BUDI HERIANTO disebut juga BUDI Bin M. SAFE'I, dan Terdakwa II BUDI Anak ALIUDIN adalah subjek hukum perorangan yang identitasnya secara jelas dinyatakan dalam Berita Acara Penelitian Tersangka di Tahap Penuntutan dan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka pada Tahap Penyidikan; mereka juga dimintai keterangan oleh Hakim dan dibenarkan di pengadilan untuk menghindari kesalahan in persona; dan
2. Bahwa untuk dapat memahami perbuatannya, terdakwa I BUDI HERIANTO alias BUDI Bin M. SAFE'I dan II BUDI harus dalam keadaan sehat. Keterikatan hukum hak dan kewajiban terhadap anak dari ALIUDIN memungkinkan mereka memiliki kemauan dan pengetahuan yang diperlukan untuk pertanggungjawaban pidana (elemen mental/mens rea), yang memungkinkan mereka untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

# Unsur “Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain;”

Unsur “Mengambil Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Menjadi Milik Pihak Lain”: SIMONS mendefinisikan “mengambil (Wergemen)” sebagai mengambil kepemilikan atau penguasaan nyata atas

suatu objek, sedangkan “Barang” mengacu pada segala sesuatu yang bersifat fisik dan termasuk barang, dan “mengambil” sebagai membawa suatu benda di bawah kendalinya yang sebenarnya Benda itu harus bermanfaat dan berharga, dan dalam konteks ini, mengambil sesuatu berarti mengambilnya dengan sengaja dengan maksud untuk menyimpan, menjual, atau menukarnya.

Apabila suatu barang dikuasai seluruhnya atau sebagian oleh orang lain, hal itu menandakan bahwa pelaku tidak memiliki seluruh atau seluruh barang yang bersangkutan.

Berikut adalah tepat berdasarkan keterangan yang disampaikan selama persidangan, antara lain keterangan para saksi, Terdakwa, dan keterangan yang diperoleh sebelum persidangan:

* Tepatnya ketika para terdakwa memasuki ruang sidang pada tanggal 1 Februari 2022, kira-kira 13.00 WIB. Dengan menggunakan linggis yang telah disiapkan sebelumnya untuk memecahkan teralis jendela, tersangka mendobrak jendela samping rumah saksi dengan cara memanjat pagar samping dan masuk melalui jendela.
* Benar setelah mendobrak teralis jendela, para terdakwa masuk ke rumah saksi melalui jendela. Di sana, tanpa sepengetahuan atau persetujuan saksi, barang-barang yang dibawa antara lain satu penyedot debu, satu televisi LG 32 inci dengan braket, satu tabung gas, satu blender, satu kotak wifi, satu SIM, satu STNK, satu set compo tape dan speaker, dan satu pemanggang roti bermerek Satu (1)

penerima parabola Akira, Satu (1) remote TV LG, Satu (1) penutup teropong hitam, Satu (1) tabung gas, dan Satu (1) aki mobil

* + Bahwa akibatnya para Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke rumah Terdakwa I, dan pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 sekitar pukul 13.00 WIB kembali ke rumah saksi dan mengambil barang-barang tersebut yaitu tiga satu unit keramba air bersih otomatis, satu unit compact disc vcd merk pioneer, dan satu unit compact disc vcd merk pioneer dan remote. air furify, 1 (satu) set pembersih lantai merek lion star livina, 1 (satu) penutup teropong hitam, dan 1 (satu) penanak nasi.

# Unsur “Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain;”

Kata dalam bahasa Belanda untuk melanggar hukum adalah weerrechtelijk, yang berasal dari kata weer, yang berarti melawan atau melawan, dan recht, yang dalam bahasa Jerman berarti hukum. Artinya wederrechtelijk adalah illegal atau melawan hukum, sedangkan pengertian kata dengan niat mengacu pada kehendak, keinginan, atau kesengajaan pelaku untuk memiliki benda tersebut. Untuk menjatuhkan hukuman, unsur pidana yang disebutkan dalam pasal tersebut harus ada. Sifat melawan hukum yang diatur secara jelas dan tersirat dalam suatu pasal merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi. Ajaran yang melawan hukum formal dan ajaran yang melawan hukum material adalah dua

kategori di mana ajaran melawan hukum yang berdasarkan doktrin termasuk dalam hukum pidana.

Menurut gagasan sifat ilegalitas formal, suatu perilaku adalah ketika suatu tindakan dianggap ilegal dan memiliki konsekuensi pidana, itu melawan hukum. Konsep ini berpendapat bahwa ketidakabsahan suatu perbuatan, yang menjadikannya kejahatan menurut hukum, hanya dapat dihapus oleh hukum melalui proses yang dikenal dengan pencabutan demi hukum atau dekriminalisasi.

Menurut gagasan pelanggaran hukum material, suatu perilaku adalah ilegal jika bertentangan dengan hukum dan norma-norma masyarakat. Suatu tindakan harus memperhitungkan standar hukum tertulis dan tidak tertulis untuk dianggap melanggar hukum. pengesahan suatu perbuatan yang sudah ditetapkan sebagai pidana untuk menghilangkan keabsahannya bagian hukum tertulis dan tidak tertulis dapat dicabut.

Bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan, keterangan terdakwa, dan keterangan saksi semuanya menjadi dasar dari fakta-fakta yang dihadirkan di persidangan:

* Itu akurat; pada tanggal 1 Februari 2022, sekitar pukul 01.00 WIB, para terdakwa masuk ke rumah saksi dengan cara memanjat pagar samping, kemudian merusak kaca samping saksi dengan cara memecahkan teralis jendela dengan linggis yang telah mereka buat. siap.
* Bahwa benar para Terdakwa mendobrak kisi-kisi jendela, masuk ke rumah saksi melalui jendela, lalu masuk ke dalam rumah tanpa sepengetahuan dan seizin saksi Saya ambil 1 buah penyedot debu, 1 buah Televisi LG 32 inch dengan braket, 1 buah gas silinder, satu blender, satu kotak wifi, satu SIM, satu STNK, satu set compo tape, satu set speaker, satu pemanggang Harumi, satu pemanggang Philips Cucina, satu set kunci rumah, toko, dan mobil, satu biru Tas merek BCA, satu alat pijat/refleksi, satu penerima parabola Akira, dan satu tabung gas.
* Demikian pula, barang-barang ini dikeluarkan satu per satu dari loteng menggunakan tangga. Pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022, sekitar pukul 13.00 WIB, para terdakwa kembali ke rumah saksi dan mengambil barang berupa 1 (satu) vcd compact pioneer dan remot merk disc, 1 (satu) unit steam otomatis bersih mesin air, 1 (satu) buah kuali merk royal vkb, 1 (satu) set alat pembersih lantai, dan tali yang diambil dari rumah saksi dibuang ke luar pagar.
* Terdakwa kemudian dituduh membawa barang-barang tersebut dengan fakta bahwa terdakwa menghasilkan Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) melalui penjualan sebagian barang. Setiap terdakwa mendapat Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari uang yang dibagi rata antara terdakwa I dan II. Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan pribadinya.

# Unsur “Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak”

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “malam” adalah waktu dari matahari terbenam sampai fajar menyingsing. Sementara penafsiran

R. Soesilo terhadap Pasal 98 KUHP menyatakan bahwa “malam” diartikan sebagai waktu antara matahari terbenam dan fajar, penafsiran ini agak terbuka karena Pasal 98 tidak menentukan jam berapa. Mengikuti tempat kejadian adalah pengertian malam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 KUHP. Sulit untuk mengetahui apakah di luar sudah gelap atau terang karena kondisi malam hari.

Struktur apa pun yang digunakan sebagai tempat tinggal atau struktur apa pun yang diklasifikasikan sebagai satu disebut sebagai "rumah" atau "tempat tinggal". sebuah apartemen. Kita dapat menyimpulkan bahwa kata "rumah" mengacu pada setiap tempat tinggal. Pekarangan tertutup, menurut Lamintang, adalah sebidang tanah dengan tanda batas yang jelas yang dapat dengan mudah dibedakan dari properti sekitarnya. Perbatasan ini tidak selalu harus terbuat dari besi atau batu bata; mereka mungkin juga pagar bambu. -tanaman, termasuk parit kering, gundukan batu atau tanah, dan parit.

Berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan bukti- bukti yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

* Pada tanggal 1 Februari 2022, sekitar pukul 13.00 WIB, tepat, para terdakwa masuk ke rumah saksi dengan cara menskalakan rumah saksi. pagar samping dan Selanjutnya dengan menggunakan linggis yang telah disiapkan, Terdakwa memecahkan teralis jendela pada jendela samping rumah saksi sehingga menimbulkan kerusakan.
* Benar setelah mendobrak teralis jendela, para terdakwa masuk ke rumah saksi melalui jendela. Di sana, tanpa sepengetahuan atau persetujuan saksi, barang-barang yang dibawa antara lain satu penyedot debu, satu televisi LG 32 inci dengan braket, satu tabung gas, satu blender, satu kotak wifi, satu SIM, satu STNK, satu set compo tape dan speaker, dan satu (satu) pemanggang roti bermerek 1 (satu) tas biru merek BCA, 1 (satu) alat pesan/refleksi, 1 (satu) receiver parabola Akira, 1 (satu) remote TV merek LG, 1 (satu) buah penutup teropong hitam, 1 (satu) tabung gas, dan 1 (satu) aki mobil
* Bahwa akibatnya para terdakwa membawa barang-barang tersebut ke tempat tinggal terdakwa I, dan pada tanggal 5 Mei 2022, sekitar pukul 13.00 WIB, para terdakwa pergi dan kembali ke tempat tinggal saksi, mengambil barang-barang yang bermerk

Pioneer vcd dan remote, serta barang-barang lainnya antara lain remote control, tali yang diperoleh para Tergugat dari rumah saksi, dan beberapa barang lainnya, kemudian Para Terdakwa membawa pulang para Terdakwa II dengan membawa barang- barang tersebut: 1 (satu) unit mesin air uap merk clean matic; 1 (satu) kuali merk royal vkb; 1 (satu) set alat pembersih lantai merek lion star livina; 1 (satu) buah penutup teropong warna hitam; 1 (satu) penanak nasi; dan 1 (satu) unit air furify.

# Unsur “Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu”

Kondisi ini menunjukkan bahwa ada dua atau lebih pencuri yang berencana mencuri sesuatu secara bersama-sama. Dalam situasi ini, para pelaku perlu memiliki niat yang sama (gezamenlijk opzet).

Sedangkan Profesor Muljatno mengklaim bahwa ada tiga teori hukum tentang niat berdasarkan teori dan doktrin hukum dalam hukum pidana, yaitu:

* Penunjukan maksud dan tujuan pelaku adalah keputusan untuk melakukan kejahatan atau pencapaian hasil tertentu dari tindakan tersebut.
* Ungkapan tindakan "sengaja sebagai suatu kemungkinan" mengacu pada pengambilan keputusan sambil mengingat prospek suatu tindakan dan konsekuensi ilegal yang berpotensi terjadi.
* Perbuatan atau kegiatan yang dilakukan dengan sengaja seolah-olah pasti mempunyai akibat tertentu adalah perbuatan yang diketahui atau dapat dibuktikan oleh pelakunya.

Menurut keterangan para saksi, keterangan anak, dan surat keterangan praperadilan, sebagai berikut:

* Bahwa benar Terdakwa I melintasi jalan saksi pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar tengah hari (WB). Kediaman JOKO YANTO terletak di Jalan HMO Bafadal No. 17 RT. 07 Desa Cempaka Putih, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, dan Provinsi Jambi. Terdakwa I meminta agar Terdakwa II memperbolehkan Terdakwa II masuk ke rumah saksi dengan mengatakan, “Bud, rumahnya kosong, ayo beraksi,” dan disambut dengan jawaban, “Ayo.”
* Itu akurat; pada tanggal 1 Februari 2022, sekitar pukul 01.00 WIB, para terdakwa masuk ke rumah saksi dengan cara memanjat pagar samping, kemudian merusak kaca samping saksi dengan cara memecahkan teralis jendela dengan linggis yang telah mereka buat. siap.
* Bahwa benar setelah mendobrak teralis jendela, para terdakwa masuk ke rumah saksi melalui jendela. Tanpa sepengetahuan dan persetujuan saksi, para terdakwa kemudian mengambil barang- barang dari rumah tersebut, antara lain (satu) unit penyedot debu, 1 (satu) televisi berukuran 32 inci dan braket merek LG, 1 kaleng

gas, 1 blender, kotak wifi, dan SIM, masing-masing 1 unit compo tape dan speaker, 1 unit pemanggang roti merk Harumi dan Philips Cucina, 1 unit rumah, toko, dan kunci mobil masing-masing, 1 unit alat pesan/refleksi, Masing-masing 1 unit receiver parabola Akira, 1 unit remote TV merk LG, 1 unit tutup teropong hitam, 1 unit tabung gas dan aki mobil.

* Bahwa dengan demikian, para terdakwa menggunakan tali yang diperoleh dari saksi untuk melewati loteng dan mengeluarkan barang-barang tersebut satu per satu Para terdakwa kembali ke rumah saksi pada tanggal 5 Mei 2022, sekitar pukul 01:00 WIB, dan membawa barang-barang antara lain 1 (satu) buah vcd compact disc merk pioneer dan remote, 1 (satu) unit mesin air steam merk clean matic, 1 (satu) kuali merk royal vkb, 1 (satu) set alat pembersih lantai singa merk star livina, dan 1 (satu) teropong warna hitam. Barang-barang tersebut dibawa oleh Penggugat ke rumah.

# Unsur "Mereka yang melakukan kejahatan mengakses TKP dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan menggunakan kunci palsu, pakaian, instruksi, atau pakaian yang terlihat resmi untuk sampai ke objek sasaran."

Untuk mendapatkan akses ke TKP atau untuk mengambil kembali barang curian, SUGHANDI menegaskan aspek ini berlaku jika pencurian dilakukan dengan cara merusak, memecahkan, memanjat, atau menggunakan

kunci palsu, pesanan palsu, atau pakaian palsu. Sesuatu harus dirusak, diganggu, atau entah bagaimana dikompromikan agar elemen-elemen ini dapat diterapkan karena pembongkaran berarti melakukan kerusakan parah.

Berdasarkan keterangan di persidangan yang memuat keterangan terdakwa dan keterangan para saksi, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

* Tepatnya pada tanggal 29 Januari 2022, sekitar tengah hari WIB, Terdakwa I mampir ke rumah saksi. di Jalan Terdakwa saya melihat rumah di HMO Bafadal No 17 RT. 07 Desa Cempaka Putih, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, Provinsi Jambi. Terdakwa I menginstruksikan Terdakwa II untuk mengeluarkan barang-barang dari rumah saksi JOKO YANTO pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 dengan mengatakan, “Bud, rumahnya kosong, ayo bertindak”
* Bahwa akurat; pada tanggal 1 Februari 2022, sekitar pukul 01.00 WIB, para terdakwa masuk ke rumah saksi dengan cara memanjat pagar samping, kemudian merusak kaca samping saksi dengan cara memecahkan teralis jendela dengan linggis yang telah mereka buat.
* Bahwa benar setelah teralis jendela dijebol, para terdakwa masuk ke rumah saksi melalui jendela. Di sana, tanpa sepengetahuan dan persetujuan saksi, para terdakwa mengambil barang berupa (satu) unit penyedot debu, (satu) unit televisi 32 inci merek LG dengan braket, (satu) tabung gas, (satu) blender, ( satu) kotak wifi, (satu) set compo tape, (satu) set speaker, (satu) unit pemanggang roti Harumi, dan (satu) Karena itu, barang diambil satu per satu dengan melewati loteng

menggunakan tali yang diperoleh terdakwa dari tempat tinggal saksi, kemudian dikeluarkan melalui pagar samping dan dibawa ke tempat tinggal terdakwa I.

* Pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 sekitar pukul 13.00 WIB para terdakwa kembali ke tempat tinggal saksi dan mengambil barang berupa 1 (satu) vcd, 1 (satu) tabung gas, dan 1 (satu) aki mobil Penutup teropong warna hitam, penanak nasi, dan air fryer termasuk hadiah yang dibawa pulang oleh para terdakwa untuk Terdakwa II.

Dari semua unsur pidana yang ada, kami Jaksa Penuntut Umum berkeyakinan bahwa Terdakwa I BUDI HERYANTO alias BUDI Bin M. SAFE'I dan anak Terdakwa II BUDI dari ALIUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut. dari "Pencurian dalam Keadaan yang Memburuk." Menurut Bagian 363(2) KUHP, tuduhan yang dibuat dalam surat dakwaan telah ditetapkan.

Tidak ada “alasan pemaafan” atau “pembenaran” karena para terdakwa tampak sehat jasmani dan rohani berdasarkan tingkah laku dan tutur kata selama persidangan pembenaran” yang dapat menutupi kesalahan dan perbuatan melawan hukum para Tergugat. Para Terdakwa mempertanggung jawabkan perbuatan dan kesalahannya, mereka harus dihukum dengan setimpal.

# BAB V PENUTUP

# Kesimpulan

Kesimpulan skripsi ini yang didukung oleh data, informasi, dan fakta terkait putusan hakim nomor 346/Pid.B/2022/PN.Jmb adalah sebagai berikut:

* 1. Putusan hakim Nomor 346/Pid.B/2022/PN.Jmb yang dianalisis oleh penulis, memiliki permasalahan dimana putusan tersebut tidak sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hakim menjatuhkan hukuman penjara satu tahun sepuluh bulan, yang jauh lebih kecil dari hukuman maksimal tujuh tahun untuk orang dewasa. Mengingat putusan hakim harus didasarkan pada persyaratan Undang-Undang dan harus menilai kembali kerugian yang diderita oleh korban dan terdakwa yang terlibat, maka tumpang tindih ini tentu menimbulkan masalah residivis, yaitu merujuk pada orang yang berulang kali melakukan kejahatan.
  2. Faktor-faktor yang diperhatikan oleh hakim Pengadilan Negeri Jambi sebelum menghukum pencuri dengan hukuman pidana, dipandang dari tiga sisi, yaitu fakta hukum, fakta persidangan, dan faktor sosiologis. Dimana di fakta sosiologis dapat menimbulkan salah penafsiran, menurut penulis kerugian yang dilakukan putusan nomor 346/Pid.B/2022/PN.Jmb sangatlah besar. Dan juga para terdakwa merupakan residivis dalam tindak pidana pencurian. Akibatnya, hakim harus benar-benar mampu memutus perkara sesuai dengan Undang-Undang yang bersangkutan.

# Saran

Penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Suatu perkara pidana harus ditangani secara profesional oleh majelis hakim untuk melindungi masyarakat, korban tindak pidana, dan terdakwa yang dituduh melakukannya. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa di persidangan, fakta hukum yang disajikan didukung oleh bukti yang cukup untuk mencegah terdakwa dibebaskan dari semua tuntutan pencurian oleh penulis kasus pidana.
2. Jika majelis hakim masih ragu akan tindak pidana yang diputusnya, perlulah ditambah alat-alat bukti yang akan memperkuatnya dengan berkoordinasi dengan penyidik yang mengajukan perkara tersebut.

# DAFTAR PUSTAKA

* 1. **BUKU**

Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011

A.Z. Abidin, *Bunga Rampai Hukum Pidana,* Jakarta, Pradnya Paramita, 1983

E. Utrecht an Moch Saleh Djindang, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Sinar Harapan, Jakarta, 1983

Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana,* Jakarta, P.T. sofmedia, 2012

Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Perkembangannya, Jakarta, 2012*

Harahap, M Yahya, *Pembahasan dan Peenrapan KUHAP*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005

Hulukati, Tien S, *Hukum Pidana*, Bandung, 2014

Lasmadi, Sahuri, *Pertanggungjawaban Koporasi Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Indonesia, Disertasi Doktor Pasca Sarjana Universitas Airlangga,* Surabaya, *2003*

M. Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2012

Marzuki, PeterMahmud, *Penelitian Hukum*, Cet 2, kencana, Jakarta, 2005 Moeljatno*, Asas-asas hukum pidana,* Jakarta, Rneka cipta, 2002

Mulyadi, Lilik, *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya, 2007

Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Hukum,* Bandumg, Mandar Maju, 2008

Rifai, Ahmad*,Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif,* Cet.1, Sinar Grafika, Jakarta,2010

Rifai, Ahmad, *Penemuan hukum*, Sinar grafika, Jakarta, 2010

Simanjuntak, Usman, *Teknik penuntutan dan upaya hukum*, Jakarta: Bina cipta, 1994

Subekti dan Tjitrosoedibjo, *Kamus Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2002

Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni. Bandung, 1986

Widnyanya, I Made, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, FIKAHATI ANESKA, 2010

Wiyanto, Roni*, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2012

Zulkifli dan Jimmy P*,.Kamus Hukum,*Grahamedia Press,Surabaya, 2012

# Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amademen Ke-4

Soerodibroto, Soenarto, *KUHP dan KUHAP*, PT.Raja Grafindo Persada Jakarta,2000.

# Kamus

Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafik.

Departemen Pendidikan Nasional*, Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka

Zulkifli dan Jimmy P, *Kamus Hukum*,Grahamedia Press, Surabaya.

# Internet

<http://digilib.unila.ac.id/2760/11/BAB%20II.pdf> <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/30176/4/Chapter%20I.pdf>